

**RISALAH**  
**RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI**  
**DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**  
-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari, tanggal : Rabu 3 Februari 2016  
Waktu : Pukul 10.30 s.d. 15.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

Acara : Tindak lanjut pembahasan RUU KUHP,  
Pengawasan orang asing dan temuan hasil  
pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2015

**JALANNYA RAPAT:**

**PIMPINAN RAPAT/ F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR;**  
**Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM, dan seluruh jajarannya serta**  
**hadirin yang kami muliakan.**

Sebelum kita memulai kegiatan ini, kami mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa sebab hanya atas perkenan-Nya kita dapat menjalankan kegiatan Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM pada pagi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan catatan yang ada di meja pimpinan, rapat kerja kita pagi ini telah dihadiri 10 dari 51 Anggota Komisi III DPR dan 9 dari 10 fraksi. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Peraturan Dewan mengenai Tata Tertib Persidangan, rapat ini seyogyanya belum memenuhi kourum untuk kita buka, tetapi karena fraksinya sudah 9 dari 10, maka saya mohon izin Bapak-Ibu Saudara-saudara sekalian apakah berkenan kita lanjutkan sambil nanti menunggu teman-teman yang lain datang sebab sudah 9 dari 10 fraksi. Kita anggap saja 9 dari 10 ini mewakili 51 ini. Setuju ya? Pak Menteri bisa kita lanjutkan? Baik atas seizing Bapak-ibu sekalian,

perkenankan kami membuka Rapat kerja ini dan Rapat kerja ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajarannya atas kesediannya memenuhi undangan Komisi III DPR dalam rapat pagi ini. Rapat yang sudah beberapa kali kita tunda mengingat kesibukan menteri yang luar biasa. Demikian juga kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR kami menyampaikan ucapan terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini kami tawarkan dari meja Pimpinan. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan penjelasan penyampaian dalam rapat kerja dari Pak Menteri nanti terkait dengan legislasi, legislasi nasional, legislasi yang berkaitan dengan Komisi III DPR hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan mungkin nanti penjelasan atas temuan hasil pemeriksaan BPK untuk Semester I Tahun 2015. Setelah itu nanti kita lanjutkan tanya jawab dan yang ketiga kita tutup dengan kesimpulan. Dengan demikian, nanti kalau jalannya jalan biasa kita akan selesai pukul 13.00-lah paling lama, tapi kalau nanti belum juga kita akan lanjutkan nanti kita lihat keadaan saja. Untuk sementara kita agendakan saja dulu sesuai dengan mekanisme Tatib kita akan selesai pukul 12.00 untuk ishoma atau pukul 12.30, lalu nanti setelah itu kita istirahat kalau masih mau lanjutkan, tapi kalau tidak ya kita tutup. Kita sepakat begitu ya pukul 12.30.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik demikian pengantar singkat kami dari meja Pimpinan. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya kami persilakan. Kami mempersilakan Pak Menteri untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting untuk disampaikan. Kami persilakan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Dr. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR.**

Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarannya atas kesempatan ini, kita dapat menghadiri rapat kerja ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bersama ini dapat memperbaiki kinerja pemerintahan dan koreksi-koreksi kritis dari teman-teman Anggota Komisi dan Pimpinan akan menjadi masukan berharga kepada kami dan kami mengucapkan selamat kepada Pak Bambang Soesatyo sebagai nahkoda, sebagai ketua mudah-mudahan kerja sama kita akan tetap dapat ditingkatkan dihari mendatang. Selamat datang Pak Mul. Kami akan mulai menjawab melalui power point ini. Jadi hal-hal yang kurang jelas bisa diminta penjelasannya.

## **Bapak-Ibu sekalian.**

Kami berbicara tentang kelembagaan. Di Kementerian Hukum dan HAM ada 11 unit Eselon I, ada 33 Kanwil, ada 836 unit kerja sesuai dengan data yang ada pada kita. Ada 282 lapas, rutan 157, Kanim 121. Yang paling pokok-pokok disini AKIB, AIM, ada AIM baru saja kami laporkan kepada Pimpinan dan Anggota. Baru saja kita mengadakan MoU dengan Menristek Dikti, AIM akan kita tingkatkan menjadi politeknik yang sebetulnya Akademi Imigrasi. Mudah-mudahan dengan peningkatan ini dapat memperbaiki SDM kita kedepan, menambah kemampuan SDM kita dibidang keimigrasian kedepannya.

Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, aparaturnya yang ada di kementerian ada 44000, ada 460. Di pusat 3.847, 40.613 di daerah. Jadi di pusat hanya sekitar 9% dari total aparaturnya ASN kita, Aparatur Sipil Negara kita dan 91% berada di daerah dan sesuai yang ditanyakan perkembangan pembahasan, Rencana Undang-Undang tentang KUHP dibawah Pimpinan Panja Pak Benny sudah berjalan, memang ada beberapa hal yang perlu penyesuaian, kami sudah mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi kita bentuk tim, kita sudah konsolidasi, hasil kita evaluasi, hasil rapat Panja kita sebelumnya. Kemarin kita sudah rapat dengan tim perumus Rencana Undang-Undang KHP dan juga dengan tim baru kita untuk kita konsolidasi agar pembahasan Rencana Undang-Undang KUHP ini ditingkat Panja dapat berjalan lebih smooth, lebih baik.

Perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu semua bahwa tim perumus KUHP yang kita ikutsertakan bersama pemerintah adalah milik kita semua. Dia menjadi narasumber. Jadi dia termasuk narasumber DPR, termasuk narasumber kita, walaupun dia kita hadirkan melalui pemerintah karena rencana Undang-Undang KUHP ini melalui proses yang sangat panjang dimulai Tahun 1960-an sampai sekarang melalui perdebatan yang sangat panjang melalui pakar-pakar yang sudah cukup dibahas dengan panjang perdebatan dan lain-lain, maka barangkali kalau kita dapat menyelesaikannya setelah kita merdeka 70 tahun menyelesaikan undang-undang ini barangkali ini akan menjadi masukan karya kita yang cukup besar bagi bangsa dan negara ini. Untuk itu, kami dari pemerintah akan tetap terbuka dengan Panja dan dengan Pansus, dengan komisi bagaimana agar pembahasan Rencana Undang-Undang KUHP ini dapat kita tingkatkan dengan baik.

Kemudian rencana Undang-Undang tentang Terorisme posisinya sekarang ini sudah disampaikan kepada Pak Presiden mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diusulkan ke DPR dan nanti terserah DPR apakah itu dibahas melalui gabungan, melalui Pansus Komisi III DPR dengan Komisi I DPR atau bagaimana itu adalah domain dari DPR, tapi sudah disampaikan kepada presiden dalam waktu dekat akan dikirimkan ke DPR. Tentang Rencana Undang-Undang KPK kami menunggu dari DPR yang kami dapat informasi sedang dibahas di Baleg. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat kita bahas bersama. Barangkali ini yang kita harapkan pikiran-pikiran, perdebatan-perdebatan yang ada akan menjadi masukan kepada kita. Yang pasti, saya kira semua kita sepakat bahwa ini adalah dalam rangka memperbaiki kinerja, dalam rangka penguatan kelembagaan KPK yang ada.

Kemudian dibidang keimigrasian Bapak-Ibu sekalian, dibidang kekayaan intelektual *sorry* saat ini, dibidang keimigrasian *sorry* dibidang keimigrasian kita sudah mempunyai program pengawasan orang asing, memang Bapak-ibu sekalian, paska bebas visa yang diterapkan mulai pertengahan tahun lalu kita terus melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing yang ada di Indonesia, kegiatan orang asing selama tinggal diwilayah Indonesia. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean diseluruh kawasan Asean, Dirjen Imigrasi memperketat pengawasan orang asing ya dengan peraturan ketentuan yang berlaku dan bersama instansi terkait lainnya baik Polri, baik Menaker dan instansi lainnya dalam rangka pengawasan orang asing. Kita juga menerapkan apa yang kita sebut dengan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola manajemen hotel, penginapan penjamin untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing yang ada di hotelnya. Dengan aplikasi ini kita bisa mengecek misalnya di beberapa hotel yang sudah mempunyai jaringan dengan kita Pak cukup banyak hampir seluruh Indonesia, jadi kita dapat mengetahui berapa orang asing disana, tanggal berapa masuk, tanggal berapa keluar. Jika ada indikasi dari pihak-pihak aparat penegak hukum, kalau dia masih berapa dilingkungan penginapan barangkali, kita dapat dengan mudah memantaunya.

Dibidang kekayaan intelektual Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita juga dengan Pansus sedang membahas Rencana Undang-Undang Hak Paten dan Rencana Undang-Undang Merek dalam proses pembahasan Tingkat I yaitu mendorong para penghasil kekayaan intelektual yang berasal dari Perguruan Tinggi, UMKM, Litbang Pemerintah melalui insentif pendaftaran merek paten desain industry dan hak cipta yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2015. Ini juga dimaksudkan mendorong creator dan inventor domestic agar menghasilkan kekayaan intelektual yang mampu bersaing di pasar asia. Kita memberikan insentif-insentif secara khusus kepada UMKM, kepada Perguruan Tinggi yang mau mendaftarkan patennya atau hak ciptanya.

Membangun system perlindungan kekayaan intelektual yang mengedepankan kepastian hukum, kemudian 4 diadopsinya ketentuan madrid protocol dalam rencana Undang-Undang Merek ini akan mempermudah balai pengusaha domestic untuk bersaing di negara ASEAN antara lain pendaftaran merek dengan system madrid protocol didaftar dan langsung berlaku di beberapa negara yang ikut dalam madrid protocol. 5 dicanangkannya Tahun 2015 sebagai tahun indikasi geografis nasional dan simplifikasi mekanisme pendaftaran indikasi geografis mengalami system online. Di KI kita menyediakan layanan elektronik kekayaan intelektual, pengurangan biaya permohonan, kekayaan intelektual bagi usaha mikro dan UKM, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pengembangan dan termasuk warga binaan pemasyarakatan. Ada karya-karya kerajinan atau pun hak cipta kalau ada warga binaan pemasyarakatan ini dapat ada pengurangan permohonan kekayaan intelektual juga pemanfaatan tenaga ahli pemeriksa untuk menyelesaikan permohonan paten dan merek.

Dibidang AHU Administrasi Umum ada perubahan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum pelaksanaan AHU online terkait pengesahan dan data badan hukum Perseroan Terbatas, yayasan dan perkumpulan, dan

pendaftaran jaminan prudusial. Ada pembebanan system dan program pelayanan AHU online pembenahan, memperkuat fungsi ... notaris Indonesia, keempat, penguatan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menerbitkan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing untuk menghimpun dan mempersatukan pandangan advokat Indonesia dalam menghadapi MEA.

Kami juga menerima beberapa surat ada dari teman advokat dalam merespon bagaimana dengan MEA nanti masuknya advokat-advokat asing dan bagaimana kita juga bisa keluar melakukan praktek-praktek hukum di beberapa negara lainnya. Barangkali ini merupakan tantangan buat kita dan barangkali ini perlu kita bicarakan secara baik agar dan pada saat yang sama memperkuat SDM kita disini, advokat-advokat kita. 5. Implementasi rancangan aksi Tahun ... terkait dengan kewarganegaraan online. Ini termasuk agenda ke 2016. 6. Melakukan sertifikasi ISO 9001 2015 terkait manajemen mutu pelayanan administrasi hukum online. Perlu kami sampaikan di bidang AHU kita mendapat beberapa penghargaan tentang pelayanan AHU online. Jadi ini merupakan prestasi yang saya kira merupakan hal yang perlu kita apresiasi. Di bidang pelayanan bantuan hukum, memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dilakukan dengan melalui program bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pada Tahun 2016 dan bantuan hukum sebesar Rp38 miliar untuk litigasi dan non litigasi dianggarkan sebesar Rp6 miliar, memang tahun lalu sedikit tidak terserap karena beberapa hal, tetapi tahun ini kita memperbaiki sistemnya. Mudah-mudahan Tahun 2015 akan bisa terserap dengan baik. Memaksimalkan pemanfaatan dan penyerapan anggaran bantuan hukum ini pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 targetkan pembentukan 175 desa sadar hukum dengan kriteria-kriteria yang ada. Kriteria-kriteria yang ada. Kriteria-kriteria yang ada dan adanya perubahan tugas fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di bidang pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu kami sampaikan Bapak-Ibu ada 56 rancangan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan MEA sebanyak 10 rancangan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM sebanyak 3 R Permen, Rancangan Peraturan Presiden 2, Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak satuan PP yang berkaitan dengan MEA dan Rancangan Undang-Undang sebanyak 4 rancangan undang-undangan. Di bidang pengharmonisasian rancangan perundang-undangan ada sebanyak 363 dan mendukung pelaksanaan MEA sebanyak 27 rancangan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kami ingin mendalami tentang pengawasan keimigrasian. Di bidang kebijakan keimigrasian terhadap orang asing kita bersifat selektif, selektif policy artinya hanya orang tertentu yang diizinkan masuk berada dan berkegiatan di luar Indonesia. Jadi asas manfaat dan melindungi, asas kepentingan nasional, asas tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta asas menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan orang asing dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi melalui tim POA. Disini anggotanya ada Kemendagri, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kemenaker, ..., Kemenag dan lainnya, dan tata caranya dilakukan melalui seleksi administrasi, permohonan fix secara administrative melalui permohonan visa ya saat masuk dan keluar wilayah

Indonesia, pemberian izin keimigrasian di Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia, pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Wasdakim. Pengawasan ini meliputi saat permohonan visa diperwakilan Republik Indonesia saat masuk dan keluar wilayah ditempatkan di TPI Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Saat pemberian perizinan keimigrasian juga kita lakukan pengawasan, keberadaan dan ... Indonesia melalui operasi lapangan oleh Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. Tahun ini agak lumayan kita melakukan tindakan pro justisia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penegakan hukum terhadap orang asing ada dua administrative berupa pendeportasian dan proses hukum melalui proses justisia.

Dari data yang ada, saat ini di Indonesia ada 10742 orang asing yang bekerja di Indonesia. Data tenaga kerja orang asing ada 107.000. nah kalau kita bandingkan sebetulnya masih tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi kita tetap menjaga melakukan tindakan pengawasan terhadap mereka-mereka ini dibandingkan dengan tenaga kerja kita yang ada di luar orang asing yang masuk ke negara kita masih dalam jumlah yang belum mengkhawatirkan. Efektif pengawasan terhadap sejumlah lapas yang ditengarai masih menjadi tempat transaksi atau pun produksi narkoba. Ini Bapak-Ibu sekalian, apalagi dengan beberapa statement-statement dari aparat penegak hukum perlu kami sampaikan bahwa pencegahan random cek dan kita punya satgas ini tetap dilakukan juga kegiatan-kegiatan intiligennya.

Dari kegiatan pencegahan terbukti petugas pemsyarakatan mampu menggagalkan penyeludupan narkoba kedalam lapas sebanyak 79 kasus berhasil digagalkan oleh petugas, tetapi inikan tidak diekspos yang melibatkan pelaku sebanyak 106 narapidana dan tahanan. 15 orang petugas serta 16 orang pengunjung, ini dari hasil operasinya dan perlu kami sampaikan dalam rangka penegakan pencegahan narkoba di lapas ini, kita sudah mengadakan kerja sama dengan BNN tentang pedoman pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika didalam lapas kita, bekerja sama tidak hanya BNN, tetapi juga BNNP pada tingkat provinsi dan BNN kabupaten kota dan pelaksanaan cek sidak ke lapangan itu mengikutsertakan aparat-aparat tersebut.

Jadi ini perlu kami sampaikan kerja sama ini sudah kita lakukan dengan baik dan kita juga sudah menyampaikan ke BNN, kalau masih ditengarai ada dalam kerja sama penempatan para bandar yang ditengarai mempunyai jaringan-jaringan khusus, kami sudah bekerja sama dengan BNN dan meminta kepada BNN data-data orang-orang yang ditengarai masih mempunyai jaringan untuk ditempatkan di lapas khusus di Gunung Sindur ini sudah kita kerja sama. Dimana disana ada Lapas Gunung Sindur adalah blok khusus yang di *twenty four hours* CCTV tidak total non communication ya bertamu juga tidak secara fisik bertemu hanya melalui telepon, jadi tidak mungkin ada penyusupan penyerahan barang ke dalam ya, kemudian pengawasannya dilakukan oleh tiga instansi Kementerian, BNN dan Bareskrim. Nah itu yang kita katakan. Kalau masih ada jaringan-jaringan yang melalui teknologi IT dari inteligen BNN yang masih itu kita pindahkan saja ke Gunung Sindur. Sekarang sudah berapa? 18 orang ya yang diberikan namanya oleh BNN. Jadi pengeledahan tetap kita lakukan, ini yang ingin kami juga perlakukan. Kita juga punya MoU dengan Badan Reserse Bareskrim tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan kerja sama dalam melakukan itu. Jadi tidak sendiri-sendiri.

Kemudian gangguan Kamtib narkoba di lapas karena saat ini ada over kapasitas yang cukup tinggi di kita. Banyak pencandu yang dipidana, ditahan yang bercampur dengan kurir serta bandar didalam lapas dan rutan karena kita keterbatasan jumlah fasilitas yang ada, memang kami harus jujur masih terdapat petugas-petugas yang membantu napi menyeludupkan narkoba kedalam penyeludupan narkoba ke dalam dengan iming-iming imbalan.

### **Bapak-Ibu sekalian.**

Perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini memang jumlah napi dan tahanan narkoba meningkat secara signifikan. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa lapas dan rutan kita ini secara bertahap meningkat secara signifikan. Saya buat contoh Pak, pada waktu akhir Tahun 2014 itu tahanan ada 51 narapidana, 109 ribu, jadi jumlahnya itu akhir 160.780 itu pada akhir Bulan Oktober 2014 dengan kapasitas hanya 114.000, jadi ada kelebihan 141%. Nah akhir tahun Bulan Oktober 2015 ada 174.000 total napi dan tahanan ya. akhir Bulan Januari Tahun 2016 ini Pak, napi kita itu dan tahanan ada 178.000, ada 178.000. Dengan demikian, berarti ada penambahan sekitar 18.000 dalam satu tahun, padahal lapas kita yang bertambah yang kita tambah cuma 2700 orang. Jadi kapasitas penambahan lapas dengan kapasitas penambahan masuk jauh sekali perbandingannya. Jadi ini yang menjadi persoalan kita, sehingga kalau tren ini terus-menerus, maka over kapasitas yang semakin mengerikan akan terjadi didalam lapas dan ini pada umumnya adalah tahanan-tahanan narkoba. Kalau kita tidak punya paradigma yang baru tentang menyelesaikan pengguna-pengguna narkoba ini sangat lucu sekali.

Ini sangat bisa berbahaya sekali dan yang sangat aneh lagi Pak perlu kami sampaikan ini kepada Komisi III DPR, dari seluruh tahanan narkoba, ada napi narkoba ada berapa jumlah totalnya? Sekitar 55 ribu lebih yang pengguna itu Pak, yang pengguna itu secara yuridis hanya 1800. Jadi berarti 1850-an katakan 53.000 itu adalah bandar dan kurir ini sangat aneh. Mengapa? Lebih banyak toko daripada pembeli. Jadi kalau artinya kira-kira begini, tokonya 50 sekian ribu, 52 ribu, pembelinya cuma 1700 berarti ada sesuatu pendekatan yuridis yang aneh. Nah ini barangkali perlu kita perhatikan bersama apa yang salah? Penerapan hukumkah? Karena kalau pengguna narkoba adalah Undang-Undang Narkotika harus direhabilitasi. Kita juga pemerintah sudah mengeluarkan dana rehabilitasi dalam soal ini.

Jadi barangkali kalau kita tidak membuat satu terobosan tentang hal ini kita khawatir memang coba tadi kita hanya bisa mampu 2500 penambahan sudah lebih dari 10 ribu. Untuk membangun satu lapas dengan kapasitas 1000 itu sekitar Rp150 miliar . Kalau kita hanya mendekatinya dengan menambah lapas-lapas tidak bisa kecuali ada penyelesaian yang lebih baik dengan satu pencegahan masuknya narkoba, rehabilitasi narkoba, pemakai dan lain-lain.

Dalam rangka pengawasan kedalam, walaupun dalam over kapasitas, kita memperketat kunjungan napi, melakukan pengeledahan secara berlapis, melakukan test yuridis secara berkala, random kepada seluruh petugas, membatasi,

melarang petugas yang dilepas dinas masuk kedalam dan meningkatkan sarana pengamanan dengan cara system IT termasuk CCTV dan lain-lain. Upaya pemasyarakatan mengatasi upaya over kapasitas, penambahan bangunan seperti saya sampaikan tadi hanya 2700, padahal kita ada peningkatan yang cukup besar. Percepatan program reintegrasi social salah satu kebijakan yang perlu kita lakukan, kita di Panja Pak Benny sebagai Pimpinan sedang membahas jenis-jenis hukuman. Saya kira, konsep restorative justice menjadi salah satu pilihan yang nanti kalau berjalan dengan baik ini percepatan program reintegrasi social dengan konsep-konsep restorative justice didalam penghukuman barangkali akan bisa mengurangi over kapasitas yang ada tentunya termasuk redistribusi narapidana dari tempat padat ke yang longgar, ini kadang-kadang memang ada masalah karena ada protes dari keluarga. Kalau ditempatkan terlalu jauh akses keluarga untuk mengunjungi menjadi sangat sulit.

Kemudian rencana penyusunan rencana induk pembangunan UPT Pemasyarakatan kita sedang punya dan ada penambahan-penambahan dalam rangka penambahan blok-blok teroris, lapis-lapas untuk teroris. Penertiban kawasan Nusa Kambangan Bapak-Ibu sekalian, ini ada pertanyaan yaitu kita sudah berkoordinasi dengan Kepala BPKP untuk melakukan kajian atas kerja sama Kemenkumham dengan PT Holcim tentang penambangan batu kapur. Pada tanggal 3 Juni 2015 telah diterima laporan dari kajian dari BPKP. Adapun rekomendasinya sebagai berikut;

- a. kementerian diminta mengajukan peraturan yang menjadi dasar hukum pemilihan pengelolaan kawasan Nusa Kambangan yang sebelumnya ini adalah ... dari Belanda, jadi perlu penguatan;
- b. Kemenkumham mendaftarkan hak pengelolaan Kepala Badan Pertahanan Nasional berasal dari konversi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dan menyusun rencana tata ruang kawasan Pulau Nusa Kambangan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita harus berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait terutama dipinggiran-pinggiran pengawasan pos-pos dipinggiran sekitar pulau.

Kementerian juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama penambangan batu kapur yang meliputi tentang pemanfaatan kayu hasil penebangan, konsesi lahan, realisasi ganti rugi bentuk barang kita evaluasi yang dilakukan Tahun 2015, 2013, 2014, perbaikan terhadap pelaksanaannya.

Sekjen sudah melakukan konsultasi dengan BPKP terkait dengan hasil audit konsultasi dengan BPKP tersebut dan sudah diadakan rapat dengan PT Holcim mengenai perlunya peningkatan ganti rugi berupa barang dan peningkatan ganti rugi ini ya, peningkatan CSR dan pengamanan bersama di Nusa Kambangan. Jadi ini yang barangkali kita lakukan pada Tahun 2015 melalui APBN atas dukungan Bapak-Ibu yaitu di Nusa Kambangan ada penguatan dermaga, penambahan IT berupa CCTV termasuk SPT Online, penambahan jalan baru, pengadaan kapal patrol, pos jaga dan pengadaan motor trile disekitar Nusa Kambangan dalam rangka pengawasan.



Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan dalam PNBP. Atas pertanyaan komisi tentang hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 yaitu:

1. Menyusun dan meletakkan perlakuan mekanisme penatausahaan PNBP yang meliputi prosedur realisasi, unsur pelaksanaan rekonsiliasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi PNBP secara periodic.

Perlu kami sampaikan kepada Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR, dengan bebas visa yang sekarang sudah mencapai 90 negara ya, kita kehilangan PNBP sudah Rp1 triliun ya? dengan masuknya Australia lagi Rp1 triliun. Nah ini sangat terasa sekali di Kemenkumham. Jadi dengan hilangnya PNBP Rp1 triliun dari bebas visa dan sebelumnya dari visa on river bisa kita Tarik. Jadi ini betul-betul PNBP dari Kementerian Hukum secara drastic. Oleh karenanya, kita menyusun dan menetapkan sekarang dalam rangka audit BPK termasuk penetapan pelayanan paten terintegrasi dengan monitoringnya ya, meningkatkan pengawasan, pengendalian terkait penyajian piutang PNBP, pemeliharaan paten dan laporan keuangannya, melakukan pembinaan kepada operator Simak BMN Dirjen IMigrasi untuk lebih teliti menggunakan hasil stock opname sebagai persediaan, membentuk tim pengelolaan pemeliharaan aplikasi keimigrasian untuk menghindari ketergantungan kepada pihak ketiga.

Aparat pengawasan internal pemerintah melalui Irjen telah melakukan perifikasi untuk meneliti riil cost terhadap pengadaan barang dan jasa dan melaporkan hasil perifikasi ini kepada BPK, melakukan inventarisasi atas asset-aset Kemenkumham diantaranya yang digunakan, dihuni, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk dilakukan penertiban penggunaan BMN. Ini berkaitan dengan asset-aset yang masih dihuni oleh mantan-mantan pegawai kita. Anggaran Tahun 2016 Bapak-Ibu sekalian, tahun ini kita mengalami penurunan ya rupiah murni kita ada Rp7 triliun dan PNBP Rp2,4 triliun jumlah Rp9,5 triliun. Nah dana tersebut dialokasikan dipusat Rp4,1 triliun, di daerah Rp5,3 triliun. Alokasi anggaran di pusat termasuk anggaran tunjangan kinerja Rp1,6 triliun.

Jadi perlu kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian bahwa alokasi anggaran Tahun 2016 dapat dilihat tidak perlu kami sampaikan. Rincian dari yang Rp9,5 triliun itu perunit program ada di halaman 27 dapat dilihat. Jadi kalau dilihat disini sekarang ya PMBP dari keimigrasian Rp1,7. Ini sebetulnya kalau tidak ada bebas itu bisa naik sekitar Rp1 triliun. Kami meminta dukungan dari Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR karena kita mengalami pengurangan anggaran dari Tahun 2016 yang Rp1,6 triliun, maka kami meminta dukungan dari Komisi III DPR dengan anggaran tambahan nantinya sekitar Rp2,2 ya untuk pemenuhan belanja pegawai sekitar Rp300, untuk operasional satuan kerja baru pemyarakatan sekitar Rp66 miliar, peningkatan kualitas SDM sekitar Rp18 dan yang besar itu pembangunan prosedur pemyarakatan pengadaan dan prasarana-prasarana Rp1,5 triliun. Pemenuhan anggaran untuk nabi sekitar ah Rp284 ini karena ada anggaran penundaan yang dari pemerintah pada waktu itu, jadi semua Rp2,21 triliun.

Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Bapak-ibu, nanti dalam pendalaman kami akan menyampaikan beberapa hal. Mohon izin perlu kami sampaikan, kalau bisa kita menyelesaikannya maksimum sampai pukul 14.00 akan kami *appreciate* karena pukul 15.00 ada rapat cabinet terbatas di Istana.

Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan dan para Anggota yang terhormat.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menkumham yang telah memberikan penjelasan kepada Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya tadi Pak Menteri minta kalau bisa selesai pukul 14.00. Oleh sebab itu, kita hemat waktulah. Saya usulkan supaya dibagi perfraksi saja kalau bisa supaya Pak Menteri bisa satu kali sekaligus menjawabnya. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu Anggota komisi III DPR atau nanti dulu ya beda Pimpinan nanti dulu. Kami persilakan mulai dari Fraksi PDI P dan seterusnya. PDIP fraksi yang punya kuasa yang mulia kami persilakan.

### **F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.A):**

Terima kasih Pimpinan.

### **Saudara Menteri dan jajarannya.**

Junimart Girsang Sumatera Utara III. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang dan *concern* dimasalah lapas Pak Menteri. Ini sudah merupakan pakta notoar ya tidak perlu dibuktikan lagi bahwa disebuah lapas sekarang ini narkoba semakin marak ini sudah fakta tidak perlu diperdebatkan dan bahkan beberapa kali Kepolisian melakukan sweeping di lapas, di Lapas Siantar ya, di Lapas Tanjung Balai bahkan para petugasnya bukan terindikasi terbukti memakai. Lebih konyol lagi memperjualbelikan narkoba disana. Kami berharap Pak Menteri tidak boelh diam dengan situasi seperti ini. Pak Menteri jangan membiarkan hanya Kepolisian atau BNN yang mempunyai tugas dan kewajiban me-minimize itu. Menurut saya paling efektif Pak Menteri melalui unit yang ada langsung turun ke lapangan Pak Menteri. Ada satu kalapas yang saya tahu, nanti kalau Pak Menteri mau tahu saya sampaikan. Memakai narkoba juga bahkan memperjualbelikan narkoba. Kita sangat malu dengan situasi ini. Bagaimana kita berbicara narkoba, kita berantas diluar, sementara didalam lebih semarak lagi Pak Menteri. Nah didalam kertas putih ini tidak disebutkan tentang hambatan, tentang situasi lapas didalam dan tidak dibahas tentang narkoba yang beredar disana. Oleh karena itu, Pak Menteri kami berharap dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM segra turun untuk bisa langsung masuk kedalam karena kalau polisi mau masuk, sudah ketahuan Pak. Mereka sudah lebih dulu mengantisipasi itu. Oleh karena itu, melalui forum ini sekali lagi kami minta sesegera mungkin Kementerian Hukum dan HAM bisa bersikap dan tidak menunggu dalam waktu yang lama.

Yang kedua, Pak Menteri banyak tahanan lapas yang mengeluh tentang kegiatan mereka selama di lapas. Sebagai contoh misalnya di kampung saya di Dairi sana ada beberapa tahanan wanita yang tidak mempunyai kegiatan. Mereka diminta kepada saya untuk disiapkan mesin jahit disana. Nah apakah ini sudah termasuk menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur pemasyarakatan dan pengadaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang Pak Menteri sampaikan dalam forum pagi-siang hari ini. Mereka sangat memerlukan itu disana karena mereka

menghitung waktu disana. Kalau tidak ada kegiatan tentu yang kita khawatirkan terjadi penyimpangan didalam perilaku Pak Menteri. Ini fakta disana yang tidak bisa dipungkiri mereka perlu mesin jahit. Ada Kalapas yang tidak mempunyai kendaraan sama sekali. Sepeda motor saja tidak punya. Ini menjadi masukan kepada Pak Menteri yang mungkin belum sempat turun ke kabupaten-kabupaten termasuk Dairi, Tanah Karo. Kalau Tanah Karo saya kira Pak Menteri seringlah kesana, tapi Dairi ini Pak Menteri, kalau ya mereka butuh mesin jahit disana ini sangat sederhana. Saya sampaikan ke Kalapasnya, kalau saya berikan mesin jahit bisa, tapi bagaimana caranya? Apakah ini menjadi inventaris dari lapas atau bagaimana ini. Coba dibikin aturan mainlah sampai saya tawarkan begitu Pak karena begitu mirisnya kita melihat bagaimana mereka disana ya kalau berbicara tentang kapasitas itu sudah umum, saya tidak perlu saya sampaikan disini ya kekurangan tempat segala macam itu sudah menjadi hal yang dilematis ya masalah lapas di Indonesia.

Saya kira itu Pak Menteri masukan dan penegasan dari kami. Tolong masalah narkoba diselesaikan dari dalam. Bukan dari luar masuk kedalam, tetapi dari dalamlah yang kedalam sekarang ini. Itu lebih efektif. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Junimart Girsang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Golongan Karya.

#### **F-PG (H. AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Terima kasih Pimpinan.

#### **Anggota Komisi III DPR yang saya hormati; Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Saya tadi menyimak betul apa yang dipresentasikan oleh Pak Menteri khususnya saya menunggu, menunggu sekali tentang paradigma barunya, tapi setelah saya simak dimana itu tempat paradigma barunya dan terobosannya. Dari presentasi tadi belum Nampak apa paradigm baru ini tentang narkoba, tapi saya mengapresiasi bahwa Pak Menteri bekerja sama dengan BNN, BMP dan BMK dibawah. Itu salah satu kerja sama yang menurut saya sangat penting. Mungkin kita melihat narkoba itu sebaiknya atau katakanlah usul atau saran kita menghadapi perang. Narkoba ini ancaman dan tantangan dan perang bagi Bangsa Indonesia. Kalau mainset kita perang, maka narkoba itu musuh dan kalau musuh kita harus bisa memetakan di medan perang ini darimana narkoba ini datang. Darimana narkoba ini datang ke Indonesia, maka kita harus memukulnya bukan dengan rehabilitasi, walaupun rehabilitasi itu penting, tetapi memukul di awal narkoba itu datang.

Kita pasti sudah tahu negara mana yang mendatangkan narkoba ini ke Indonesia ini. Itu pun harus dibukakan petanya, sehingga kita bisa memukul

langsung di daerah-daerah tertentu dimana narkoba itu masuk. Nah selama ini mainset kita tentang narkoba adalah hanya berarah ke gejala di lapas, lalu bandar, pengendar dan pemakai, tetapi tidak dalam memetakan darimana narkoba ini hadir, bagaimana jalurnya dan siapa saja yang harus menangkalnya. Saya kira, kalau kita mempersepsi narkoba itu sebagai sebuah perang, sebuah pertempuran walaupun kita masuk dalam proseksi wars sekarang, dalam peran asimetris, tapi narkoba ini adalah sebuah perang karena menghancurkan generasi muda yang luar biasa. SD, SMP di daerah dapil saya sudah kena. Sangat memprihatinkan.

Tadi Pak Menteri memperhatikan 55 ribu bandar dan pengedar, 180 ribu lebih pengguna. Kalau tidak keliru begitu angkanya. Nah saya kira hal-hal over capacity sebagainya, kita harus tangkal dari awal. Saya kira, ini yang mungkin bagaimana mainset kita disamakan dengan seluruh instansi yang terkait dan dengan seluruh potensi yang ada untuk memerangi narkoba ini. Saya ingin sedikit mengutarakan tentang aspirasi dari bawah ini dari dapil cabang XI Kota dan Kabupaten Tasik. BNN di Kota dan Kabupaten Tasik ini belum terbentuk. Nah bagaimana kira-kira Pak Menteri dengan seluruh jajarannya menggalang kerja sama dengan BN.... Dia masih dirangkap oleh Pemda belum ada kantor, padahal di Jawa Barat itu paling tinggi kalau lihat statistiknya pengguna, pengendar dan pemakainya atau pengederanya adalah di Tasikmalaya itu di Jawa Barat dan kalau saya secara sedikit emosional untuk mematahkan itu, Tasikmalaya itu adalah kota santri, kota yang sangat religious. Religious intensitasnya tinggi. Ini sasaran Pak Menteri dan kalau kita lihat petanya secara nasional hampir kantong-kantong yang memiliki kota-kota santri ini menjadi arah betul sasaran dari narkoba ini. Ini secara emosional baik di Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur itu tingkat konsumsi narkobanya sangat tinggi. Dengan demikian, saya mengutarakan dalam hal ini paradigm baru apa yang Pak Menteri ingin kemukakan didalam memerangi narkoba ini, lalu suatu terobosan baru apa yang Pak Menteri akan kemukakan, sehingga kita mempunyai mainset, cara pandang yang sama dalam menghadapi ini semua.

Kemudian Pak Menteri, saya sedikit tadi mengamati tentang anggaran, tentang permohonan 2,2 lebih, tetapi tentang peningkatan SDM sangat sedikit sekali. Ini saya sangat prihatin karena saya temuan di dapil saya sendiri tentang misalnya latihan drafting yang diadakan oleh kementerian yang harus bayar. Keluhan mereka janganl bayarlah, gratiskan bagi teman-teman dibawah itu. Kira-kira pelatihan drafting bagi orang-orang di daerah itu tidak bayar. Ini keluhannya dari mereka.

Yang kedua, membikin drafting itu menyusun undang-undang ya. ya legal drafting betul. Nah kemudian penyuluhan Pak Menteri, ini di desa-desa ini saya sering menemukan bahwa mereka memang kesadaran hukum ini menjadi penting. Jadi kalau melihat dari susunan anggaran itu relative kecil sekali ini, barangkali perlu ditingkatkan kalau saya mendukung perlu ditingkatkan dalam soal ini tentang anggaran untuk penyuluhan, untuk melakukan kesadaran hukum di desa-desa untuk juga menerbitkan kompilasi hukum untuk desa-desa. Ini merasakan desa-desa ini masih sangat kekurangan terhadap informasi hukum ini, apalagi dengan sekarang kita ingin desa membangun. Saya kira, Pimpinan itu saja yang saya kemukakan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

### **PIMPINAN RAPAT:**

...kalau saya tidak salah dulu Pak Menteri siapa mantan Menteri Hukum dan HAM jaman dulu itu? Dia bilang “negara tanpa penjara”. Mr. Saharjo. Cita-cita dia itu kalau bisa negara kita ini tidak ada penjaralah, tidak ada lapas. Kalau dulu penjara bikin menurut dia jaman colonial itu lapas itu tempat buangan, pemberontak terhadap pemerintah colonial kan begitu. Siapa Mr Saharjo ya? nah kalau jaman merdeka ini ngapain ada lapas, lalu dirubahlah namanya lembaga pembinaan kan begitu. Jadi bukan untuk ini maksudnya, untuk membina, tapi teman dari Fraksi PAN bilang “lapas bukan lagi tempat pembinaan, tapi disana tempat latihan kejahatan”. Jadi lapas ini menjadi tempat transaksi kejahatan yang luar biasa. Selanjutnya saya persilakan Fraksi PKS.

### **F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S. Ag., M.Si.):**

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Beni selaku Ketua Rapat dan juga Ketua Komisi Pak Bambang Soesatyo dan Pak Mulfahri Harahap.

### **Pak Menteri bersama para Direktur Jendral, Sekjen dan para Kepala Badan beserta jajaran yang kami hormati.**

Dalam kesempatan ini karena tadi Pak Menteri, dalam penyampaiannya meminta masukan dan saran begitu Pak Menteri ya? maka saya memberikan saran, tadi saya terima kasih ini Pak Menteri sudah dikasih buku “Membangun Hukum dan HAM Dengan Pasti” wah luar biasa ini, Cuma memang kedepan barangkali nanti kalau ada tahun kedua Pak Menteri, mudah-mudahan ada gambar Pak Menteri dengan pimpinan kami, dengan Ketua Komisi III DPR, dengan Wakil Ketua Komisi III DPR karena saya lihat tidak ada di foto ini. Mudah-mudahan tahun kedua ada Pak Menteri ya.

### **Pak Menteri yang saya hormati.**

Kami memberikan apresiasi tentu dengan apa yang Pak Menteri sampaikan, tapi karena ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan soal apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Memang yang pertama itu soal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun 2015 ya Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Jadi memang disini ada sejumlah temuan yang ditemukan oleh BPK dan kemudian juga ada sejumlah rekomendasi dan juga ada kesimpulan, dan saya membaca satu persatu hasil temuan rekomendasi serta kesimpulan yang dibuat oleh BPK, nampaknya memang Pak Menteri harus lebih maksimal ya terutama di Direktorat Jendral Keimigrasian atau

Dirjen Imigrasi yang memang disini perlu untuk ditingkatkan ya. Saya rasanya akan kehabisan waktu kalau membaca satu persatu apa yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi menurut saya ini agak serius ya, agak serius temuan-temuan ini dan tentu kami berharap agar temuan-temuan bisa ditindaklanjuti oleh kementerian dengan memperbaiki apa yang telah disarankan atau disimpulkan oleh BPK.

Yang kedua, Pak Menteri soal bantuan hukum. Tadi juga sempat disinggung didalam penyampaian Pak Menteri. Saya pikir memang kita berterimakasih karena anggaran bantuan hukum itu meningkat ya dibandingkan tahun sebelumnya ya. dimana pagu anggaran Tahun 2015 itu pagu awalnya Rp45 miliar, kemudian serapannya itu sekitar Rp24 miliar lebih atau 54,11% untuk legitasi sebesar Rp21 miliar dan non legitasi sebesar Rp2 miliar lebih, jadi ada sisa pagu di Tahun 2015 itu sekitar Rp20 miliar lebih kurang.

Jadi Pak Menteri yang saya hormati, Cuma memang meskipun kita sudah maksimal soal bantuan hukum ini, tetap saja kemudian hasil survey menunjukkan bahwa alokasi dana bantuan hukum ini sangat kurang ya, jadi ada 47 responden yang kemudian disurvei oleh Yayasan Bantuan Hukum Indonesia yang menunjukkan bahwa 47 responden itu mengatakan bahwa alokasi dana bantuan hukum itu sangat kurang ya 49 menyatakan kurang dan hanya 4% yang menyatakan cukup ya. Jadi saya pikir mungkin harus ditinjau kembali, dievaluasi kembali dimana kendala dan tidak efektifnya ya pelaksanaan program bantuan hukum ini. Ada sementara kalangan menilai bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2015 tentang Besar Biaya Bantuan Hukum Legitasi dan non legitasi itulah yang menyebabkan kendala dan tidak efektifnya alokasi dana bantuan hukum itu. Nah karenanya, barangkali perlu dievaluasi soal ini, sehingga kemudian tidak menimbulkan persoalan di lapangan karena ternyata Pak Menteri yang saya hormati bahwa di lapangan ya banyak kendala ya, jadi belum lagi kalau misalnya beban kerja dan kondisi geografis organisasi bantuan hukum ya yang jauh-jauh ya, sehingga kemudian ini akan berdampak terhadap layanan bantuan hukum terutama kepada orang-orang miskin karena Pak Menteri saya waktu itu barangkali Pak Menteri juga ikut dalam kita membentuk Undang-Undang Bantuan Hukum ini ya.

Jadi dengan adanya regulasi keputusan menteri tersebut ya akhirnya apa? Akhirnya berkuranglah jumlah OBH ya, jumlah OBH, sehingga kemudian juga membuka peluang rakyat miskin harus membayar sejumlah uang terhadap OBH karena alasan kekurangan dana dan yang paling mengkhawatirkan kita Pak Menteri adalah tidak maksimalnya ya penanganan hukum bagi rakyat miskin karena keterbatasan biaya. Barangkali dalam kesempatan ini sebagai-bagian dari fungsi pengawasan, saya meminta agar Pak Menteri meninjau kembali, mengevaluasi kembali keputusan menteri yang Tahun 2013 itu soal alokasi dana bantuan hukum, sehingga kemudian kita bisa melangkah yang lebih baik di Tahun 2016 ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya berharap agar Pak Menteri tidak melaksanakan ini dengan setengah hati ya, jadi jangan ada kesan seolah-olah Menkumham ya dalam hal program bantuan hukum ini bekerja atau dalam pelaksanaannya terkesan setengah hati, tapi saya yakin Pak Menteri pasti sepenuh hati ya mengerjakan ini karena ini adalah proyek kita untuk orang miskin tanggung jawab negara untuk orang-orang miskin.

Kemudian yang ketiga, Pak Menteri soal kasus di daerah yang sudah menjadi isu nasional tentang rencana pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata dinikmati ya. Nah ini Pak Menteri di beberapa komentar yang saya baca, memang agak-agak rancu. Di satu sisi ada keinginan untuk memberikan amnesti ya. Jadi ini seperti apa yang sebenarnya, lalu kemudian juga ada wacana untuk memberikan grasi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ya kami dalam kesempatan ini ingin mendengarkan secara langsung ya soal ini apa adanya disampaikan, sehingga kemudian nanti saat presiden menyampaikan permintaan katakanlah pertimbangan kepada DPR dalam hal ini Komisi III DPR bisa memberikan masukan terkait dengan soal-soal seperti ini karena di daerah juga ada pro kontra soal pemberian amnesti ini ya? karena Pak Menteri dalam kesempatan ini, saya pikir negara harus mengatasi pro kontra ini dan tidak boleh terombang-ambing, apakah memberikan amnesti atau penegakan hukum.

Yang terakhir Pak Menteri, saya pikir soal lapas ini memang menjadi pembicaraan kita karena disana ternyata berkembang ya peredaran jaringan narkoba. Kalau kita mengikuti pemberitaan di media ya itu kan seolah-olah ada gap antara BNN dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini lapas ya. Ternyata ketika saya baca *paper* dari Pak Menteri ada sejumlah kerja sama, ada sejumlah kerja sama ya bahkan ada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala Badan Narkotika Nasional. Ya ada nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan Kepolisian bahkan ada juga kesepakatan bersama berupa petunjuk teknis antara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham.

Pak Menteri, saya pikir peraturan-peraturan ini kalau memang bisa di *share* di Komisi III DPR, tolong di- *share*, sehingga kemudian kita juga bisa ikut mengawasi begitu loh. Jadi ketika kita membaca di media massa ya seolah-olah petugas lapas itu menahan atau kemudian menghalang-halangi ya petugas BNN untuk melakukan sidak atau apapun namanya ya ke lapas, padahal saya baca disini ada peraturan bersama seharusnya, kalau ada peraturan bersamakan tidak ada lagi kendala di lapangan. Karenanya saya berharap agar peraturan-peraturan seperti ini kalau memang bisa di *share* disampaikan kepada Komisi III DPR, kepada Anggota Komisi III DPR paling tidak kami mengetahui, sehingga kalau pun nanti biasakan Anggota-anggota ditanya oleh teman-teman media, kita bisa memberikan respon ya respon yang kemudian bahwa ternyata ada regulasi yang mengatur soal-soal seperti ini. Jadi soal lapas barangkali harus menjadi perhatian kita semua karena memang dari tahun ke tahun ya ini membuat kita selalu membicarakannya dan mungkin juga Pak Menteri harus ada pertimbangan soal lapas yang berada ditengah-tengah kota maksudnya saya. Apakah harus direlokasi agak jauh ya, sehingga kemudian itu bisa mengurangi dampak-dampak hal-hal yang kemudian yang bisa kita atasi.

Kemudian yang terakhir sekali saya berterimakasih karena disini Pak Menteri sudah menyampaikan soal Holcim ya yang ada di Lapas Nusa Kambangan. Mudah-mudahan di rapat kerja yang akan datang kita sudah bisa mendapatkan hasilnya ya karena disini sudah dilakukan sejumlah usaha-usaha atau upaya-upaya dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kami sudah bisa menerima apa hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan keberadaan Holcim khususnya dan lain-lain yang ada di Lapas Nusa

Kambangan. Dengan kata lain, kami ingin mendengarkan kedepan bagaimana hasil penertiban ya kawasan Pulau Nusa Kambangan.

Terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PPP.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat siang.

Salam sejahtera buat kita semua.

**Pak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat siang hari ini yang saya hormati;**

**Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR yang saya hormati.**

Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman, saya lihat Pak Menteri sudah cukup pusing menjawabnya, tapi saya mohon izin untuk tetap menambah kepusingan Bapak. Saya ingin memulai tentu meningkatkan kinerja kementerian atau lembaga pemerintahan itu tentu tidak hanya dari sisi hardware-nya saja baik infrastruktur atau sumber daya manusia, tetapi juga dari software tentu dalam kerangka perundang-undangan membentuk sebuah rezim hukum atau legal frame work yang lebih baik.

Tadi telah disoroti soal-soal yang terkait dengan pemasyarakatan kita. Kalau tadi teman-teman lebih banyak menyoroti dari persoalan-persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia saya ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan software. Kita semua sudah mengetahui bahwa sudah menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR ya, diantara undang-undang yang akan direvisi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau Undang-Undang Pemasyarakatan. Meskipun ini belum masuk didalam Prolegnas prioritas, saya rasa dalam rangka membenahi lembaga pemasyarakatan secara lebih baik dan secara komprehensif, maka kerangka hukumnya segera dibenahi. Nah dalam konteks ini, saya mohon penjelasan dari Pak Menteri karena dalam catatan kami RUU ini akan menjadi RUU inisiatif pemerintah. Persiapan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan RUU atas perubahan atau amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dengan amandemen ini saya kira Pak Menteri, disana kita selesaikan juga persoalan PP 99 Tahun 2012 yang selama ini menjadi kontroversial ya. Saya kira kan kalau ini kita selesaikan melalui undang-undang, beban yang



terkait dengan perubahan atas PP tersebut akan menjadi beban bersama pemerintah maupun DPR, tidak hanya menjadi beban pemerintah saja dengan perubahan PP yang pertama.

Yang kedua, saya ikut bersedih juga tadi mendengarkan pemaparan Pak Menteri bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM turun dan turunnya cukup tajam 14, koma sekian persen. Nah ini tentu disamping dukungan anggaran yang perlu kita berikan, saya melihat pula barangkali Kementerian Hukum dan HAM perlu juga menginisiasi, tapi saya tidak tahu persis posisinya ada dimana, tapi ini ada didalam Prolegnas prioritas Tahun 2015 revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN. Ini seharusnya ada di Komisi XI DPR ini. Sekali lagi saya tidak tahu posisinya sekarang ada dimana. Nah saya kira salah satu hal penting yang perlu diperhatikan didalam revisi Undang-Undang tentang PNBPN ini adalah Peraturan Penggunaan PNBPN yang berdasarkan undang-undang saat ini kan berbasis unit kerja dari KL itu ya ini mesti dirubah menjadi berbasis KL-nya itu sendiri, sehingga Ditjen PAS yang tentu mungkin tidak mempunyai PNBPN begitukan bisa juga nanti menikmati PNBPN dari imigrasi atau dari AHU dan mungkin juga unit lain yang menghasilkan PNBPN. Saya kira, Kementerian Hukum dan HAM selaku coordinator legislasi dari pemerintah harus menginisiasi perubahan prinsip penggunaan PNBPN dari berbasis unit kerja menjadi KL itu tadi. Nah itu yang terkait dengan legal frame.

Kemudian yang terkait dengan infrastruktur, saya kira kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu saya kebetulan mewakili Komisi III DPR menjadi pembicara di satu seminar yang diselenggarakan oleh Indonesia Australian Legal Project, disana saya juga menyaksikan pemaparan tentang blue print reformasi pemasyarakatan yang saya kira itu sudah bagus barangkali ini Pak Dirjen PAS, teman-teman di Komisi III DPR ini perlu diberi juga blue printnya, meskipun saya tidak tahu persis apakah ini ada di websitenya Dirjen PAS apa tidak, sehingga barangkali ini juga bisa menjadi pemahaman kami didalam melakukan fungsi pengawasan tentang rencana-rencana yang ingin dikembangkan baik sedang maupun akan dilingkungan Dirjen PAS, tetapi saya mencatat bahwa disana ada satu persoalan khususnya yang terkait dengan struktur organisasi ya, dimana catatan saya mudah-mudahan tidak salah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Dirjen PAS tidak memiliki rentang kendali terhadap unit pelayanan teknis rutan, lapas, bapas dan rupasan yang itu ada di unit atau di Kementerian Hukum dan HAM secara langsung. Nah ini tentunya sedikit banyak terkait juga dengan restrukturisasi organisasi maupun reformasi birokrasi. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Menteri. Namun saya mengapresiasi upaya-upaya transparan yang telah dilakukan. Saya kira Dirjen PAS ini gaul sekali jajaran Dirjen PAS karena saya lihat, kalau saya amati karena saya gaul juga itu dari facebook, twitter dan blackberry messengernya ini cukup gencar. Ini memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang terkait dengan lapas.

Yang berikutnya beberapa waktu yang lalu kita tersentak dan marah juga terkait dengan peristiwa terror yang dikenal sebagai bom jalan Thamrin. Nah kita dari pemberitaan yang ada itu mengetahui bahwa ternyata pelaku ini dikendalikan oleh narapidana yang masih ada di lembaga pemasyarakatan. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana sebetulnya program redikalisasi di lembaga

pemasyarakatan ini telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan pendekatan-pendekatan multi disiplin termasuk kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait khususnya BNPT. Ini juga mohon penjelasan.

Yang berikutnya saya kira saya ingin menyampaikan aspirasi dari dapil. Dapil saya kebetulan dapilnya Pak Sekjen Pak Menteri. Kami sangat-sangat *ope* orang Pekalongan. Ini terkait dengan tadi lembaga pemasyarakatan di Pekalongan yang ada ditengah kota dan ini memang sudah sejak jaman Belanda dan menyedihkannya lagi dimusim kering, di musim kemarau tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi lapasnya banjir karena ROB. Kami banyak mendapatkan complain dari para keluarga narapidana yang menyampaikan agar pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM memberikan perhatian dan meminta sebisa mungkin lapasnya direlokasi karena memang saya kira dari sisi tata ruang di kampungnya Pak Sekjen ini sudah tidak memungkinkan lagi ya harus direlokasi di kabupaten tidak di kotamadya lagi atau paling tidak ya direnovasi, tetapi ketika saya mengunjungi lapasnya, kalapasnya menjelaskan juga kalau direnovasi juga sangat besar biayanya. Nah ini memang lapas yang termasuk gedung cagar budaya karena ini saya kira sudah sejak jaman Belanda. Saya kira, ini juga melengkapi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nasir Djamil ya sekaligus juga mohon penjelasan karena didalam uraian Pak Menteri tadi ada permohonan tambahan anggaran untuk infrastruktur termasuk infrastruktur pemasyarakatan. Nah ini kira-kira lapas-lapas mana yang perlu direlokasi terkait dengan penyiapan untuk pagu anggaran tambahan. Saya kira dari saya itu Pak Pimpinan, tapi saya mohon Pak Pimpinan untuk menyerahkan aspirasi dari dapil langsung kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Fraksi Gerindra.

#### **F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat teman-teman Anggota Komisi III DPR dan Pak Menteri beserta jajarannya.**

Pertama-tama mungkin saya menggarisbawahi masih tetap kepada permasalahan pengawasan orang asing. Dari penyampaian yang Pak Menteri sampaikan bahwa ada system dimana pengawasan orang asing diserahkan kepada hotel-hotel untuk memberikan satu pendataan. Permasalahan orang asing ini bahkan kami dari Komisi III DPR pun sudah membentuk Panja Pengawasan Orang Asing dan kami melihat pada saat mengunjungi beberapa tempat yang kami lihat bahwa itu mempekerjakan orang asing, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kami, pertama adalah peruntukan daripada orang asing tersebut. Peruntukan, jadi mereka status masuknya itu mereka bekerja itu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Kemudian yang menjadi masalah Pak Menteri itu adalah justru bukan di hotel-hotel. Kalau di hotel-hotel itu mereka sudah jelas. Mereka datang, mereka

sebagai turis, mereka tidak akan lama satu minggu, dua minggu paling lama. Yang menjadi permasalahan justru mereka ini yang masuk secara illegal dan mereka bekerja, dan mereka tidak terdaftar di hotel-hotel.

Nah disinilah permasalahan sering timbul dan kita lihat bahwa adanya mereka melakukan criminal di wilayah Indonesia ini. Mungkin beberapa hari yang lalu kita juga lihat bahwa mereka melakukan criminal dengan melalui online. Ini mereka criminal, tetapi ada juga mereka itu yang melakukan kegiatan bisnis, penjualan-penjualan dibawah. Mereka masuk kepada pasar-pasar malam, mereka menjual itu. Nah disini memang kami melihat imigrasi berperan penting dan imigrasi didepan didalam masalah penanganan orang asing ini. Maka dari itu, hampir sama yang disampaikan oleh Pak ... mengenai masalah pengawasan orang asing ini adalah mengenai masalah SDM. Jadi peningkatan SDM terutama imigrasi, kami melihat bahwa ini sangat kurang sekali ditingkat-tingkat kabupaten. Jadi saya kira memang perlu ada peningkatan dan bahkan mungkin ada penambahan personel imigrasi karena melihat MEA. Itu dengan MEA terutama industry dan bidang ekonomi itu akan sangat berpengaruh sekali dengan adanya orang asing ini dan disinilah imigrasi berperan penting untuk penanganan masalah orang asing ini.

Kemudian yang kedua Pak Menteri, saya ikut dalam Pansus Merek. Tadi Pak Menteri sampaikan bahwa didalam Undang-Undang Merek yang baru ini akan meng-*adopt* Protokol Madrid. Nah didalam Protokol Madrid itu akan memudahkan pendaftaran. Dari pengamatan kami dibawah pada UMKM-UMKM tersebut justru mereka menakutkan adanya Protokol Madrid ini, mereka merasa bahwa dengan adanya Protokol Madrid ini mereka akan mungkin lebih berat tersaingi karena dengan system pendaftaran yang cepat dan bisa dilakukan diakses di luar Indonesia, UMKM belum siap untuk melakukan itu. Jadi perlu adanya suatu integrase peningkatan UMKM dahulu untuk bisa mereka memanfaatkan adanya Protokol Madrid tersebut. Memang salah satu syarat MEA itu adalah Protokol Madrid, tapi dalam syarat tersebut adalah kalau memungkinkan, kalau memungkinkan negara tersebut meng-*adopt* Protokol Madrid, tapi kalau melihat situasi saat ini dengan UMKM kita, belum saatnya kita meng-*adopt* protokol madrid. Ditambah lagi dengan system pelayanan saat ini Direktorat Merek, Direktorat Merek itu masih mempunyai outstanding sekitar 100 ribu merek yang belum diselesaikan.

Jadi dengan kata lain kalau kita meng-*adopt* Protokol Madrid tersebut, outstanding 100 ribu merek yang terkatung-katung, yang gemulai dari 2-3 tahun yang lalu ini akan menjadi permasalahan karena ini harus diselesaikan dahulu. Sedangkan dengan Protokol Madrid itu mereka mendaftar, mereka sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah selama tidak ada posisi mereka bisa mengatakan merek dia. Bagaimana pelayanan daripada 100 ribu? Karena 100 ribu itu kita anggap bahwa 100 ribu merek berarti ada berapa perusahaan yang merasa terkatung-katung nasibnya dan sebagian banyak adalah UMKM. Saya kira, perlu ada satu hal yang mesti kita harus sama-sama kita pahami bersama bahwa kita pada saat MEA ini kita adalah untuk kepentingan ekonomi nasional, bukan untuk kepentingan ekonomi asing. Jadi saya kira hal tersebutlah yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Pak Menteri sebagai bahan masukan untuk sama-sama kita bahas dalam Pansus Merek tadi.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Demokrat.

**F-P DEMOKRAT (I PUTU SUDIARTANA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Selamat pagi keluarga Komisi III DPR Bapak-Ibu yang kami hormati dan Bapak Menteri beserta jajaran.**

saya melanjutkan Pak terkait dengan Protokol Madrid. Apa yang Pak Menteri sampaikan uraian dilayar bahwa pengusaha-pengusaha UKM itu dipermudah didalam mendaftarkan. Ada memang permasalahan yang kami lihat diluar Pak disaat kita studi banding. Kalau di luar negeri itu sudah lengkap mereka infrastrukturnya karena seperti di infrastruktur ada asosiasnya seperti Gapensi, Apeknas dan lain-lainnya, dan lawyer-nya pun khusus di luar negeri. Kita ini belum siap untuk menyambut Protokol Madrid itu karena apa? Setiap pengusaha mau mendaftarkan bilamana tidak lengkap administrasinya langsung mendaftar, nanti kasihan UMKM tersebut, nanti terdidak pajaknya otomatis disana Pak Menteri.

Selanjutnya yang kedua, kita Dapil Bali Pak, saya Dapil Bali akan mendapatkan permasalahan yang klasik karena lokal domestic akan mendapatkan keberatan karena sosialisasi dari pemerintah itu kurang tajam turunannya itu tidak diberikan pengetahuan yang begitu mendalam bagaimana caranya mekanismenya untuk mendaftar di Protokol Madrid ini seperti Sukawati, Celup ya Ubud, Tajur Bogor itu Jogja itu akan mendapatkan permasalahan yang klasik nantinya. Saya punya pendapat, bilamana kita mesti harus mengikuti Protokol Madrid infrastrukturnya Pak supaya SK Surat Keterangan Ahli didalam melakukan pendaftaran administrasinya itu harus jelas, perusahaannya harus jelas. Jangan sampai perusahaannya tidak ada mendaftar merek, nanti repot juga kita sebagai warga tidak memiliki kelengkapan administrasi badan usaha tersebut. Itu yang akan menjadi masukan saya karena akan repot kita. Contoh banyak Pak, seperti Coca cola bagaimana caranya turunan karena ada yang memang rahasia. Untuk membikin air coca cola itukan mesti harus ada tertutup Pak. Mesti ini pendapat saya supaya bagaimana caranya menyambut MEA ini Masyarakat Ekonomi Asia lemah yang berusaha supaya juga bisa tidak jadi penonton.

Yang ketiga terkait dengan lapas Pak. Mungkin Pak Wayan ... sebagai regulator disini, masukan Bali Pak khususnya Lapas Grobogan menjadi barometer kami. Mungkin di Indonesia menjadi contoh yang terburuk karena kapasitas terjadinya permasalahan kemarin, kita masyarakat Bali tidak merasa aman jujur Pak. Saya minta kepada Bapak Menteri sambut bolalah ini. Siapapun menjadi Kalapas tidak mampu mengatasi ini. Saya punya usulan supaya Bapak mengusulkan anjing Pak sama Polisi dua disitu. Kalau ada polisi ditiap-tiap lapas ada rohnya keamanan disana Pak. Orang pasti ada filing takut sedikit karena sekarang itu masuk keluarnya itu bebas sekali. Siapapun menjabat menjadi Kalapas di Grobogan pasti nyawanya

terancam, hanya menguraikan saja tidak mampu. Saya sudah sampaikan dari saya duduk di Komisi III DPR ini Lapas Grobogan menjadi mimpi buruk untuk Kementerian Hukum dan HAM Pak. Tidak akan bisa Pak siapapun itu kecuali taruh polisi, taruh anjing sama kipas itu akan menjawab semua permasalahan terkait dengan narkoba. Ini masukan Pak karena saya lihat ada usulan terkait dengan pembangunan infrastruktur pemasyarakatan diseluruh Indonesia.

Yang keempat Pak, saya mendapatkan satu mungkin saya tidak tersinggung terhadap karena lapas mesti harus dijaga baik khususnya di Bali Pak Dirjen. Saya sempat menghubungi Kalapas Bangli Pak Didi namanya karena saya malu Pak, tahanan lari terus tidak ditemukan dan tidak kembali. Saya mau bertanya Pak, minta tolong saya mau bicara, takut saya Dapil Bali malu bilamana ada warga binaan terus lari berarti disitu ada pembiaran Pak berarti leadership dan managerialnya seorang kalapas itu tidak cocok disana. Saya minta mungkin ini pendapat, kalau saya punya usulan dipindahkan saja supaya taringnya Menteri Hukum dan HAM itu ada Pak ya. Jangan sampai oh ini ada seperti tidak ada *power*-nya Pak Dirjen ini kan begitu. Kalau ada yang lepas dari lapas ya diberikan sanksi supaya ada taringlah disitu. Mungkin ditempatkan dimana silakan Menteri Hukum dan HAM menempatkan, tetapi jangan divonis terlalu berat begitu ya. Ya kira-kira begitu Pak karena saya lihat itu saya ditelepon eh Pak Dedi, saya minta maaf Pak, saya menanyakan bagaimana tahananannya sudah kembali Pak? Bapak siapa? Jangan ditelepon-telepon, Pak izin Pak, saya wakil Bapak dari Bali, saya mau menanyakan supaya saya takut nanti imagenya nasional Pak, oh saya tidak peduli Pak. Bapak mau sewa datang saja, oh oke baik, terima kasih".

Saya sudah sampaikan ke kanwil orang yang tugas di Bali seperti Bapak Dirjen sebelum menjadi kembali, mereka ini Pak, saya bangga Bapak Roni Sihompi ini Pak seperti sudah merasakan dia baik sekali dengan masyarakat, makanya orang menangis, masyarakat Bali menangis kenapa ditarik menjadi Dirjen, kami butuh Pak tentang keamanan Pulau Bali Pak. Saya tidak pernah minta jabatan sama titip-titip orang sama beliau tidak pernah karena memang apa adanya, apa adanya begitu Pak. Ya kalau tugas di Bali itu harus senyum Pak, kalau tidak senyum kan repot Pak. Ya benar itu karena ini adalah masukan Pak, anjing pelacak sama kipas angin tambahkan Pak itu akan takut Pak. Pasti orang mau masuk itu akan repot sekali karena kita pahami Pak anggaran kita, anggaran negara tidak cukup mendanai untuk mesin detector dan lain-lainnya kita pahami inilah sebagai masukan dari Bapak-bapak yang memegang otoritas didalam kemananan didalam lapas ini dan masukan yang paling penting adalah teman-teman di Kepolisian juga menyambut bilamana ditaruh dua polisi saja disana sama anjing pelacak pasti akan berfikir orang berkunjung membawa narkoba. Kira-kira itu.

Terima kasih.

#### **F-P DEMOKRAT (RUHUT POLTAK SITOMPUL, SH):**

Pimpinan, interupsi Pimpinan. Pak Benny Kaharman nanti setelah fraksi saya mohon juga kami rakyat kecil di Komisi III DPR diizinkan ngomong.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya, tadikan kita sudah sepakat sama fraksi dulu, nanti baru rakyat kecilnya.

**F-DEMOKRAT (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):**

Ya kenapa saya ngomong begitu? Jangan nanti sudah sepakat fraksi karena menterinya buru-buru karena itu saya pertegas.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya kalau memimpin inikan sudah tahu. Jangankan sampai pukul 12.00, besok pun bisa kita lanjutkan, jadi tidak ada masalah dengan itu. Kita lanjutkan ke Fraksi PAN Pak Daeng silakan.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran.**

Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, teman-teman saya tadi, tapi perlu satu gambaran saya ada dua hal yang perlu saya soroti di Kementerian KumHAM itu. Pertama adalah kaitan dengan lapas, yang kedua adalah kaitan dengan imigrasi. Jujur saja sebagai anak bangsa saya prihatin sekali ketika ada statement dari seorang Kepala BNN "bila perlu BNN serbu itu lapas". Inikan pertanyaan besar buat kita semua. Pertama, saya akan ungkap persoalan-persoalan yang terjadi karena berita itu sampai mantan narapidana di Kabupaten Bekasi yang saya tahu, saya datangi ada apa sih sebetulnya didalam lapas itu? Dari Rutan Bulak Kapal, Lapas Bulak Kapal kelas 3 yang baru itu di Cikarang, Lapas Karawang dan Purwakarta. Sebetulnya seperti apa sih pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita dalam melakukan proses pembinaan terhadap warga binaan.

Saya jujur saja mungkin ada satu hal yang perlu Pak Menteri pikirkan kedepan beserta jajaran dari Kumham artinya ini kebutuhan yang sangat urgensi kaitan persoalan narkoba di lapas, kaitan persoalan-persoalan jujur saja dari mulai pungutan yang tidak jelas sampai pengkavlingan-pengkavlingan sel didalam ini bukan rahasia lagi, tapi menjadi rahasia umum. Saya tanyakan mereka persoalan-persoalan seperti ini seperti apa sih praktek-praktek didalam? Saya berfikir ke depan Pak Menteri punya roopmap peta jalan bagaimana kedepan, ada istilah Bahasa saya GBHK Garis Besar Haluan Kumham. Mau ngapain sih Kumham ini? Lapas itu adalah satu lembaga secara filosofi, lembaga pembinaan menyiapkan orang kembali ke masyarakat.

Sekarang anda bisa bayangkan Saudaraku sekalian, lapas-lapas sekarang tingkat huniannya saja sudah luar biasa. Narkoba bahkan sipir saja pengguna narkoba, jujur saja. Kalau tadi dibilang oleh Saudara saya Bang Junimart di Siantar sana ada Kalapas. Ini sipir bagaimana bisa menanggulangi, sedangkan undang-undang bahwa orang yang terkena narkoba adalah korban. Terus ketika didalam sana ada undang-undang, kalau korban artinya harus dilakukan proteksi, perlindungan, perawatan itu amanat undang-undang, tapi dilakukan tidak didalam lapas? Tidak bahkan mereka menjadi konsumen tetap dan pemasoknya adalah orang-orang dilembaga pasyarakatan. Tidak mungkinlah kalau pengelola pasti mengalami hal-hal seperti itu. Ini saya bilang, ini perlu perbaikan bersamalah. Kita interopeksi bersama, maka saya bilang coba semua jajaran ini berfikir ayo kita perbaiki bareng-bareng. Saya support, saya jaga marwah mitra kerja Komisi III DPR. Ini demi kebaikan bersama. Yang saya inginkan adalah ketika ada statement dari Kepala BNN seperti ada apa? Ini menjadi pertanyaan buat kita bersama. Oke, tidak perlu kita saling menyalahkan, tapi bagaimana ini harus ada proses perbaikan kedepan. Itu yang penting buat saya. Ada roopmap, ada garis besar, bagaimana pengelolaan lapas lembaga pasyarakatan terhadap warga binaan, bagaimana mungkin bangsa ini mau memperbaiki ketika judulnya adalah lembaga pembinaan, judulnya adalah lembaga bagaimana mengembalikan orang disiapkan lagi kepada masyarakat, tapi didalamnya yang tadinya mungkin dia penjahat kelas teri, dia bisa menjadi kelas besar karena terdidik didalam. Ini persoalan juga buat kita. Ini catatan Pak Menteri. Saya berharap Pak Menteri punya konsep yang jelas terhadap perbaikan lapas kedepan. Silakan Pak Menteri tanya juga. Kemarin saya muter-muter ... seperti apa sih sebetulnya didalam lapas itu. Mereka cerita begini bang, begini-begini oh oke saya bilang nanti kita sampaikan kepada orang yang berwenang berkaitan persoalan pengelolaan lapas.

Yang kedua Pak Menteri ini berkaitan dengan imigrasi. Jujur saja kita kadang ada satu harapan ketika bebas visa, tadi disampaikan ada 90 negara yang bebas visa kita berharap ada kunjungan wisata luar biasa bahkan bebas visa terhadap Cina, orang bebas visa masuk-masuk kewilayah kita untuk pengembangan bagaimana kita dapat pendapatan, tapi ada persoalan-persoalan yang perlu dicermati kita bersama. Kita berfikir mungkin ketika asing masuk ke kita, kita berharap mereka membawa uang kesini menjadi para wisatawan dan menghabiskan duitnya di kita, tapi ada satu hal yang perlu dicermati bersama, ini perlu kerja sama sebetulnya antara imigrasi, namanya BNN kaitan juga dengan Kepolisian, kaitan juga dengan Badan Inteligen Negara seperti kasus kemarin di Jepara, temuan terhadap dari mesin narkoba yang masuk sampai 100 kilo dari katanya kelompok Afganistan atau kelompok Pakistan, tapi barang itu masuk dari Tiongkok bahkan pertanyaan saya sangat besar terhadap republic ini.

Mengapa begitu luar biasa narkoba itu masuk ke kita? Ini jangan-jangan begitu loh, ini pertanyaan kembali lagi saya ungkapkan jangan-jangan ada kepentingan asing yang masuk ke kita, memang ingin menghancurkan regenerasi bangsa ini, maka saya bilang perlu kerja sama semua jajaran penegak hukum di kita, imigrasi, Kepolisian dan Badan Inteligen Negara sekalipun untuk melihat ini bukan fenomena hal yang biasa. Kalau dulu mungkin penjajahan gaya lama adalah senjata yang masuk ke kita, tapi yang paling mudah sekarang menghancurkan generasi bangsa ini. Kalau generasi bansa ini hancur, saya pikir republic ini selesai.

Masuk lewat Nunuk saya dengar 70 kilo, ada yang satu kwintal, ada segini luar biasa. Kalau terorisme kemarin itu tembak-menembak yang korban berapa, tapi kalau 100 kilogram sabu-sabu yang masuk republic ini berapa juta orang regenerasi kita itu yang mau dihancurkan. Ini jujur saja hal yang sangat luar biasa yang perlu dicermati bersama, maka perlu kerja sama nanti kedepan Pak Menteri antara lapas, antara imigrasi, antara Kepolisian, BNN dan Badan Intiligen Negara. Jadi kita jangan menganggap bahwa ketika bebas visa masuk ke kita itu dianggap bahwa kita akan mendapatkan uang banyak dari wisatawan. Perlu diantisipasi juga nanti dibuka keran ke Timur Tengah dan lain-lain. Akan muncul pemahaman radikal yang akan masuk ke kita.

Kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan, maka perlu dihitung untung-ruginya berkaitan dengan persoalan bebas visa sekalipun misalnya juga masuk tenaga kerja asing ke kita. Dikasih di kita bebas satu bulan, satu bulan itu mungkin satu orang sudah bisa pasang 4 sampai 3 mesin. Masuknya ke kita sebagai wisatawan. Masuk nongkrong ada di pabrik-pabrik dikawasan industry, apalagi kami begitu loh. Kebetulan saya Dapil VII Jabar Bekasi, Karawang, Purwakarta yang kawasan industry, saya berharap kedepan itu betul-betul ditangani betul bagaimana kedatangan orang asing itu bukan mengambil apalagi dengan nanti konteks MEA pasar bebas Asean yang dari dulu saya mengkritisi itu kenapa? Bisa dibayangkan kita punya penduduk 280 juta jiwa diserahkan sebagai sampah market dari Asean. Singapura punya 8 juta, Vietnam kumpulin mereka berapa negara di Asean ini dibandingkan penduduk kita juga tidak ada apa-apanya dan kita menjadi sampah buat market mereka.

Mereka siapkan negara-negara mereka itu untuk tidak menerima barang-brang dari kita dan mereka masukan mulai dari permen, roti dan lain-lain masuk ke negara kita dan ini harus siap-siap semuanya. Ini menjadi catatan buat kita bersama bahwa imigrasi nanti kedepan, Kumham dan jajaran lapas juga mampu mengantisipasi persoalan-persoalan ini. Kita berbicara bagaimana perbaikan bangsa ini kedepan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Nasdem.

**F-NASDEM (Drs T. TAUFIQULHADI, M.Si):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan yang saya hormati;**

**Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang kami hormati.**

Pertama, berkenaan dengan sinkronisasi sejumlah Perda dengan undang-undang. Ada sejumlah kalangan yang melihat bahwa persoalan sinkronisasi ini perlu memang diseriuskan karena itu ingin kami tanyakan bahwa sejumlah Perda ditingkat



provinsi, kabupaten atau pun kota ada masalah misalnya pada Tahun 2012, lalu ada sekitar 13.500 perda yang disinyalir bertentangan dengan undang-undang. Ini pada Tahun 2012 mungkin sekarang sudah berubah, mungkin menjadi lebih baik. Bagaimana langkah antisipatif agar supaya Perda-perda yang hendak dibentuk oleh Pemda tidak bertentangan dengan undang-undang khususnya yang sekarang terjadi adalah tidak hirarkisnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah baik antara kabupaten kota maupun dengan provinsi atau pun RTRW nasional dan sampai dimanakah sinkronisasi terhadap perda-perda yang bermasalah tersebut.

Yang kedua adalah masalah satu hal berkenaan dengan rencana pemerintah cabinet sekarang untuk menghadirkan 20 juta wisatawan asing ke Indonesia. Ini adalah sebuah rencana yang cukup besar, tentu memerlukan pemikiran dari semua pihak. Nah tentu saja ini menyangkut dengan imigrasi. Sejumlah langkah telah diambil oleh pemerintah misalnya dengan bebas visa, kebijakan bebas visa. Nah ini kami ingin tahu kesiapan pemerintah terhadap ini terutama imigrasi. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan apakah kebijakan bebas visa ini adalah bersifat resi prokal atau bagaimana? Karena yang lalu sempat terkejut masyarakat benar atau tidak, nanti tolong dijelaskan. Ketika diumumkan oleh Menko Maritim masuk namanya Israel disitu, walaupun kemudian besoknya sudah di *delete*, padahal kita ketahui dengan negara tersebut kita tidak ada hubungan diplomatic, tidak ada hubungan apapun. Ini saya ingin tanyakan bagaimana didalam konteks kebijakan tersebut.

Yang ketiga, kalau kita berikan kepada sejumlah negara tarulah Timur Tengah sekarang secara bebas, apakah sudah siap pihak imigrasi kalau sejumlah unsur-unsur tertentu datang ke Indonesia yang kemudian kita menghadapi persoalan radikalisme tersebut. Ini bagaimana menghadapi persoalan kalau misalnya didalam kontesks bebas visa, dalam konteks imigrasi ini itu yang ingin kami tanyakan.

Yang ketiga, ada sejumlah warga negara Indonesia yang sekarang ini pergi mungkin secara sukarela ke negara-negara tersebut untuk berperang dalam konteks ISIS. ISIS ini adalah sebuah posisi secara politis tentu itu adalah mengingkari nation state. Jadi kalau dia pergi kesana berarti sebenarnya dia tidak mengakui lagi Negara Indonesia maksud saya. Nah bagaimana status kewarganegaraan dia Pak Menteri yang ingin saya tanyakan Pak Menteri mereka-mereka yang pergi kesana? Kalau menurut saya mereka yang pergi kesana harus cabut pasportnya dan kemudian tidak diakui lagi tidak menjadi Warga negara Indonesia, tapi hal tersebut terserah kepada pemerintah.

Yang berikutnya saya melihat disini ada rencana meningkatkan kualitas naskah akademik berkaitan dengan sejumlah RUU diantaranya adalah naskah akademik RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kita bersyukur bahwa negara kita menjadi negara demokrasi sekarang. Ini adalah sebuah situasi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak negeri ini, untuk bangsa ini untuk berpartisipasi lebih jauh didalam politik. Kalau negara ini tidak menjadi negara demokrasi, saya tidak yakin sekarang ini saya berada di dewan seperti sekarang menurut saya, tetapi ketika mengakui tentang demokrasi tersebut ada sejumlah hal juga yang melekat masalah Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Nah ketika kita bicara Hak Asasi Manusia kita ada persoalan-pesoalan dimasa lalu yang belum

selesai. Nah saya ingin tanyakan didalam konteks ini sejauhmana kita akan pergi kebelakang? Apakah kita sampai kepada Tahun 1998 atau kita justru pergi sampai ke Tahun 1965? Ini bagaimana? Karena banyak sekali pendapat yang simpang siur didalam masyarakat dan belum ada penjelasan yang konkrit dari pemerintah didalam konteks tersebut yang kami tangkap atau barangkali saya tidak menangkap. Mungkin pemerintah bisa menjelaskan masalah tersebut. Mungkin Pimpinan dari saya tidak panjang saya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Hanura.

**F-HANURA (Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.Hum):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri dan jajaran yang hadir yang Raker dengan kita.**

Pak Menteri, ini saya focus kepada beberapa hal saja. Saya telah menerima uraian dan penjelasan temuan dari BPK Pak Menteri. Dari temuan dan rekomendasi itu memang terbanyak di Dirjen Imigrasi. Ya ada Pak Sekjen berapa. Nah saya melihat disini tentu walaupun laporan Tahun 2014 barangkali karena Dirjen baru, sehingga menerima data dan saya yakin pasti direspon. Kenapa ini sangat penting saya kemukakan karena indikasi dan penyimpangannya itu bisa sampai 150 sampai hampir 200 miliar totalnya barangkali. Ini sangat besar buat Direktorat Jendral. Karena itu, yang ingin saya tanyakan karena saya focus saja pada bagaimana kebijakan Pak Menteri dan pelaksananya oleh Dirjen atas rekomendasi itu pada tiga hal. Yang pertama tentang perintah sanksi, kemudian yang kedua teguran karena tumpunya pada Ses Dirjen itu artinya kebijakan menteri terhadap dua hal ini bagaimana dan pelaksananya oleh Dirjen karena ini supaya tidak menimbulkan sebuah prasangka yang kalau dibiarkan juga di internal akan bisa menular dan ini bisa menjebol zero tolerans yang Pak Menteri canangkan dan berkaitan dengan itu tentu harus ada perbaikan system di Dirjen Imigrasi. Nah yang ingin saya tanyakan adalah ini harus ada perubahan pola pengawasan. Kalau pengawasan fungsionalnya, tentu melibatkan Pak Irjen dan kebetulan di Inspektorat Jendral tidak termasuk yang direkomendasi oleh BPK, sehingga barangkali secara fungsional bisa ditingkatkan, tapi pola pengawasan melekatnya karena ini dilingkup Direktorat Jendral, nah saya ingin kiranya dapat disampaikan oleh Pak Menteri nanti sebagai sebuah kebijakan dan pelaksanaannya oleh Dirjen Imigrasi. Saya secara umum saja itu saya sampaikan.

Kemudian yang kedua adalah soal bebas visa. Ini harus dilakukan evaluasi menurut saya Pak Menteri karena ternyata tidak semua negara yang memperoleh atau dicanangkan sebagai bebas visa itu warganya jadi wisatawan, tapi justru kebalik ini. Potensinya saja tidak ada karena banyaknya jumlah negara. Nah ini perlu

dievaluasi, apalagi ada kebaruaran Pak didalam perkembangan keadaan sekarang yaitu soal terorisme dan narkoba. Karena itu, harus ada pembaharuan didalam melakukan evaluasi terhadap pemberian bebas visa ini.

Kemudian yang berikutnya adalah soal pemberantasan narkoba di lapas. Ya ini kenapa penting kita ulang-ulang Pak ya karena ini ada statement keras dari KBNN saya serbu katanya. Ini walaupun Pak Menteri cukup ingin dan tepi tentu melakukan konsolidasi, tapi ini harus dibaca sebagai pada titik yang paling rawan Pak Dirjen Lapas. Oleh karena itu, pola penataan lapas ini mesti dilakukan. Saya tahu sudah ada disampaikan didalam website barangkali bahwa visi-misi itu, tapi terlalu konvensional Pak. Masuknya diperketat, adanya penelitian, ada ini, tapi ada pembaharuannya dalam penataannya itu tidak ada. Oleh karena itu, jangan dipandang sepele dan sederhana karena trennya sekarang justru dari lapaslah terorisme itu dikendalikan dan dari lapaslah narkoba itu menjadi lebih luas, kemudian menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan distribusi narkoba. Sekali lagi yang saya tanyakan adalah pembaharuan pola penataannya itu dimana pembaharuannya itu Pak? Apakah kemudian ada system alarm yang kalau disana ada pergerakan di kantor menteri atau diruangan Dirjen Lapa situ sudah ada sinyal, kemudian yang memungkinkan aparat bisa masuk lapas begitu karena aparat lapas pun yang didepan dipersenjatai secara sipir didepan. Ini kalau kemudian aparat tidak bisa masuk seperti di ...oleh Pak Kepala BNN ini juga harus dipandang sebagai positif begitu Pak atau kita melakukan pola lateral. Jadi kalau lapasnya itu kebobolan justru pangkatnya dinaikan, jangan dipindah atau diturunkan begitu, tapi dipromosikan, sehingga nanti lebih banyak yang kebobolan, tapi ini prestasi karena kebobolan. Disitulah kita barangkali bisa mencari akar untuk melakukan penyelesaian persoalan lapas sebagai pusat distribusi narkoba.

Kemudian Pak Menteri yang berikutnya adalah soal pembebasan bersyarat. Itu banyak yang sudah melampau dua pertiga, tapi banyak yang macet. Itu saya terima beberapa, tapi dalam prakteknya juga saya lihat ada pembebasan bersyarat yang lama tidak turun-turun ditingkat ... barangkali Pak yang semua arahnya bahwa di Dirjen Lapas sudah selesai, sudah naik ke meja menteri begitu Pak. Itu beberapa yang saya terima SMS maupun datang kesini begitu Pak. Oh nanti kita konfirmasi ke Pak Menteri soal pembebasan bersyarat.

Kemudian soal dana bantuan hukum Pak Menteri. Itu teknisnya memang harus kita perbaiki. Dengan adanya pengajuan sampai ketinggian kementerian ditingkat pusat ini secara teknis dipandang cukup lama, padahal besarnya itu menurut teman-teman yang memberikan pendampingan bantuan hukum itu disamping terlalu kecil cukup panjang dan itu yang ligitasi, yang non ligitasi tidak bisa tersentuh karena mengalihkan anggaran itu ada bisa terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Karena itu, apakah kedepan tidak lebih baik karena hal-hal seperti itu kita lekatkan saja soal bantuan hukum di pengadilan misalnya atau kita akan kembali antara Menteri Hukum dan HAM dengan Ketua Mahkamah Agung untuk menata bagaimana dana bantuan hukum ini, sehingga bisa lebih cepat distribusinya dalam penggunaan operasional.

Kemudian yang terakhir soal penambahan anggaran Rp2 triliun, Fraksi Partai Hanura menyatakan setuju dan mendukung penambahan anggaran.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB yang terakhir.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):**

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR yang saya hormati, Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir yang saya banggakan.

Pak Menteri, saya membaca buku Pak Menteri dan sekaligus makalah “Draft Langkah H. Yasona Laoly ya Pak? H Laoly atau Haji? H. Monangan Laoly. Biasanya Wallahul Muawif Pak. Saya Jazilul Fawaid Pak dari Fraksi PKB A-75 Daerah Pemilihan Gresik, Lamongan.

Pak Menteri, saya ingin juga menyampaikan apresiasi atas buku dan makalah yang ada, mudah-mudahan kata “pasti, ayo kerja kami pasti” itu mudah-mudahan tidak hanya jadi jargon Pak sebab antara buku dengan makalah itu begitu saya buku, bukan makalah paparan Bapak tidak ada satu pun kata “pasti” disitu Pak, mungkin minimal “langkah-langkahnya”, langkah-langkahnya itu online-online Pak. Yang AHU itu apa Pak Dirjen AHU? Disini online semua sebagai langkah inovas di Tahun 2016 saya menyampaikan apresiasi.

Pak Menteri, memang banyak sorotan kepada Bapak sekaligus pegawai Bapak karena Bapak terlalu banyak, besar Pak ada 44.460 pegawai dari 836 satker yang pembiayaannya Pak Cuma Rp9 triliun Tahun 2016. Rp9 sekian itu artinya persatker hanya Rp10 miliar. Nah dengan beban yang sebesar ini menurut saya dan kejahatan juga yang sekarang ini kan dunianya mulai global Pak. Dengan eskalasi kejahatan apalagi narkoba, kalau tidak diantisipasi pasti antara kebutuhan Bapak dengan kemampuan negara memberikan anggaran akan dirasa sama Pak. Saya yakin betul kalau kerja narkoba ini, BNN atau lembaga yang lain tidak sesegera mungkin, saya yakin Pak lapas Bapak itu justru menjadi tempat yang nyaman untuk mereka karena kemampuan dana yang kecil untuk mengelola lapas itu. Oleh sebab itu, saya menyarankan saja...

**PIMPINAN RAPAT**

Kita ini sudah pukul 12.30...

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):**

Saya masih bicara Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Catatan perpanjangan bisa sampai pukul 13.00 bisa? Oke. Silakan Pak.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):**

Saya jadi lupa. Pimpinan, saya mohon nanti Pimpinan kalau itu supaya kita tertib, saya ingin tertib juga kita sedang bicara tiba-tiba Pimpinan juga memotong.

**Pak Menteri yang saya hormati.**

**PIMPINAN RAPAT:**

Begini, tadi kita sudah sepakat sampai pukul 12.30.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):**

Ya kita sedang membahas...

**PIMPINAN RAPAT:**

Oh bukan tunggu dulu kita sepakat pukul 12.30, anda belum datang, lalu untuk perpanjangan saya mohon kesepakatan lagi kan begitu Pak.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):**

Ya, tapi maksud saya kita sedang bicara itu saja. Saya menghormati Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya, makanya saya interupsi.

**F-DEMOKRAT (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):**

Pimpinan, itu aturan dari kami. Kita juga bisa mengerti Pimpinan. Kawan kita ini baru ditugaskan di Komisi III DPR ah mungkin dia belum tahu. Jadi sudah damai di bumi.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Oke, silakan lanjutkan.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

Sekali izinkan saya bicara dan melanjutkan karena sudah ada waktu untuk diberikan kepada kita semua. Seperti saya sampaikan tadi Pak Menteri, memang sekarang dunia yang seperti ini utamanya terorisme dan narkoba yang menjadi kejahatan internasional dan juga luar biasa menurut saya memang itu butuh perhatian khusus dan juga harus menggunakan teknologi Pak. Nah saya melihat penggunaan teknologi terkait dengan dua kejahatan itu, utamanya kalau kita lihat dari paparan Bapak untuk orang asing saja, hanya tiga langkah. Satunya adalah inspeksi lapangan. Saya yakin inspeksi lapangan tidak akan juga efektif sebab yang namanya orang asing Pak tidak hanya yang berjenggot, ada juga yang cantik Pak dan Bapak mencatat jumlah orang asing 107 ribu seluruh Indonesia. Saya yakin dan seyakini-yakinnya Pak, data ini data yang menurut saya masih sangat tidak valid. Jakarta tercatat hanya 15 ribu, Surabaya hanya 5000. Nah mungkin hanya tenaga kerja saja, padahal Pak Menteri kenapa ini menjadi *concern*? Karena memang yang namanya terorisme, yang namanya narkoba dan apapun namanya termasuk juga kedaulatan negara itu masuknya lewat ini Pak. Apakah lembaga penelitian, apakah yang ini, tentu Bapak tidak sampai disitu kewenangannya, tetapi maksud saya dengan merapihkan lalu lintas keluar dan masuk, apalagi negara kita, negara yang sedemikian terbuka Pak. Jalur laut ada, udara ada, gorong-gorong ada Pak dan apalagi sekarang kita dalam perdagangan yang Bapak sudah sampaikan juga dalam makalahnya kita masuk di MEA.

#### **Pak Menteri yang saya hormati.**

Yang kedua, kita di DPR juga mendorong agar produktivitas legislasi dan aturan perundang-undangan sedemikian juga diharapkan oleh masyarakat. Saya melihat Pak Menteri beberapa undang-undang dan Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR yang artinya tanpa juga pemerintah itu tidak mungkin kecuali Undang-Undang APBN yang dibuat oleh pemerintah. Saya perlu juga memberikan masukan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran agar ada kesigapan juga Pak. Ini kita sudah mengurangi waktu reses untuk produktivitas dan fungsi legislasi, tetapi tanpa Bapak juga sebagai mitra kami itu juga produktivitas itu tidak akan tercapai.

#### **Pak Menteri yang saya hormati.**

Terkait juga dengan anggaran yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk tahun 2016, saya melihat disini Pak Menteri sebelum yang legislasi tadi, saya tidak melihat dipaparan Bapak kegiatan legislasi yang akan dilakukan pada Tahun 2016. Saya disini melihat Tahun 2015 ada 56 rancangan dan Tahun 2015 juga pada huruf 2 363 rancangan peraturan dan Tahun 2016 saya tidak melihat dalam hal ini dibidang pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada halaman 5 disitu belum disampaikan terkait dengan berapa sebenarnya alokasi anggaran dan berapa pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan pada Tahun 2016.

#### **Pak Menteri yang saya hormati.**

Terkait dengan penambahan anggaran dari yang semula Rp9 triliun sekian dan kemudian meminta tambahan Rp2,213051 tentu kami tidak akan keberatan,

tetapi masalahnya dari total anggaran yang ada, saya berharap sekaligus usulan kami agar Pak Menteri betul-betul bisa menentukan prioritas-prioritas yang serius karena memang anggaran terbatas kecuali anggaran tidak terbatas. Atas keterbatasan itu, saya ingin nanti juga mendapatkan gambaran terkait karena disini tidak disampaikan, hanya disampaikan yang tambahannya saja Pak Menteri, saya ingin juga mengetahui sebenarnya proporsi anggaran terkait dengan imigrasi, terkait dengan AHU utamanya untuk orang asing itu berapa besar sebenarnya? Karena disitu menurut saya jadi soal betul, ketika kita tidak mampu mengendalikan itu, maka kedaulatan Indonesia juga akan menjadi rapuh. Baik, terima kasih Pimpinan. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan kinerja dari Kementerian Hukum dan HAM akan lebih baik lagi.

Terima kasih.

*Wallahu muafik ilaaqwa mithoriq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, Bapak-Ibu sekalian. Tadi kita sepakat, Pak Menteri juga telah menyampaikan ada kegiatan pukul 14.00, tapi kembali saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak-Ibu sekalian. Bertanya banyak boleh lama silakan. Selanjutnya kami persilakan kalau masih ada Bapak-Ibu Anggota yang ingin menyampaikan dan kami persilakan. Saya mulai dengan Pak Ruhut Sitompul.

#### **F-DEMOKRAT (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salom.  
Om suwastiastu name budaye*

Biar suasana enak, saya bicara dengan yang enak-enak dulu. Buku Pak Menteri bagus sekali. Tolong hukum dan HAM-nya diperpanjang. Boleh tanya kepada Rianizar Menteri Pertahanan, dia tidak senang dengan HAM. Dia suka bilang hak asasi monyet. Silakan saya idola dengan Ria Mizart Riakudu ya waktu dia Kasat, jadi tolong HAM-nya diperpanjang biar kita senyum sedikit lagi melihat halaman 16. Pertama kulihat buku yang bagus ini kaget juga aku, sejak kapan Pak Yasona Laoly Sekjennya Pak Soesilo Bambang Yudhoyono mirip Pak e ada ade kakak ini Pak Sekjen? Mirip loh ya, tapi tidak apa-apa. Mana tahu nanti Pak Sekjen juga suatu saat akan menjadi presiden ya itu biar kita santai.

Jadi begini Pak, tadi kita ngomong banyak mengenai lapas kaitan narkoba. Usul adek saya dari Fraksi Demokrat, memang perlu Pak MoU baik dengan polisi, kalau perlu dengan tentara kita yang banyak ini kita fungsikan. Di semua lapas itu Pak harus *roling* tidak boleh tetap Pak, jadi harus bergantian terus Pak karena kalau lama dibina oleh para bandar. Itu fakta. Jadi ide adek saya tadi Pak Putu itu sangat

baik sekali Pak kita roling semua lapas. Ini sudah gawat Pak. Saya sering turun ke lapas ya, ngeri itu jalan satu-satunya Pak kaitan dengan lapas ini. Saya ingin jujur saja Pak ya ini juga kewenangan, walaupun Bapak mengatakan draftnya belum Bapak terima revisi Undang-Undang KPK karena saya ingat sekali pertama Bapak Menteri, saya juga pernah dapat revisi itu disini KOP-nya Menteri Hukum dan HAM. Yang ingin saya pertegas, Pak tolong kasih aku bisa jelaskan kepada rakyat revisi itu dimana memperkuat KPK-nya tolong Pak. Kalau kita satu pemikiran bagi saya mau memperkuat KPK dengan revisi kita tambah koruptor dihukum mati. Itu baru memperkuat. Kalau sadaplah, kalau SP3-lah inilah memperlemah tegas aku katakan. Jadi tolong Pak kita sama-sama pendukung Pak Jokowi Widodo, kita tim sukses beliau, kita tahu kampanye kita mengenai korupsi ini, rakyat miskin karena ulah para koruptor begitu Pak.

Kembali ke narkoba. Saya menghormati Pak Budi Waseso yang dikenal sekarang dengan buas Kepala BNN. Tolong Pak itu juga kampanye kita, saya mendampingi Pak Jokowi Dodo pada waktu itu, apabila sudah incraht para bandar segera dieksekusi. Kemarin rakernas PDI Perjuangan itu juga salah satu modal utama Bapak Presiden kepada kader-kader PDI Perjuangan bilang saya takut, bilang saya ragu-ragu sudah berapa yang saya eksekusi narkoba, sudah berapa ratus kapal yang saya tenggelamkan, tolong Pak ya sampaikan kepada Pak Presiden aku juga ketemu sama beliau, tapi Bapak lebih baik karena itu aturannya. Kenapa Pak? Ini makin besar kepala para bandar, pengendar ini karena kita lihat sudah mulai lemah, padahal berapa banyak yang sudah incraht. Mau dibawa ke petun pun sudah tidak perlu eksekusi Pak. Generasi muda rusak karena bandar dan pengedar ini. Rakyat miskin karena para koruptor, negara tidak stabil karena ulah para teroris. Tolong Pak, kami Komisi III DPR mitra Bapak, Bapak ini orang yang sangat diberkeati satu dapil engan saya Sumut tidak terlebih, tapi oleh Tuhan dikasih garis tangan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Bayangkan Pak Yasona Laoly ini sangat diberkati Tuhan.

Jadi Pak saya dukung Bapak maju terus Pak, saya lihat para pembantu Bapak juga dengan pakaian putihnya merasa sejuk saya di Komisi III DPR ini Pak ya dengan punya mitra yang seperti Bapak. Jadi maju terus Pak, saya tetap mendukung Pak Yasona dan seluruh jajaran.

Terima kasih.

*Wabilahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Salom.*

*Santi-santi name budaya.*

## **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih banyak.

Jangan lupa beliau ini bukan PDIP Pak, Cuma kalau tadi dia sebut berkali-kali ketemu Bapak Presiden Jokowi mendukung itu betul juga, dia adalah pendukung utama Bapak Jokowi menjadi Presiden dan pada saat ini menjadi Ketua Departemen



bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat Menko Polhukam, jadi itu posisinya supaya jangan salah sangka seolah-olah PDIP tadi disebut PDIP bukan. Selanjutnya Ibu Ria dipersilakan.

**F-PDIP (DWI RIA LATIFAH, SH, M.Sc):**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya tadi sudah berharap-harap dikasih kesempatan duluan. Sudah telpon-telpon diam-diam Pak Ketua rupanya harus pakai gaya Bang Ruhut dulu baru dikasih duluan. Kadang-kadang sebagai partai berkuasa itu tidak bisa juga ngatur-ngatur harus seperti dulu rupanya Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua.

**Pak Menteri yang saya hormati.**

Saya pernah membaca atau melihat fenomena yang terjadi ketika terjadi suatu terror yang kita katakan bom Sarinah atau Thamrin City, kemudian adalah wacana untuk membuat penjara khusus untuk teroris dan Pak Menteri juga memberikan keterangan bersama dengan Pak Luhut dan beberapa petinggi yang lain, tapi ada hal yang mungkin saya ingin diberikan penjelasan wacana ini seperti apa yang Pak menteri maksudkan atau pemerintahan maksudkan karena saya khawatir juga bahwa kita ini terjangkit terus penyakit terhadap kebijakan yang sifatnya hanya latah atau menutup suatu persoalan karena ada satu persoalan besar yang muncul, tapi tidak dianalisa, tidak dikaji secara komprehensif, apakah itu betul-betul efektif, apakah itu bisa betul-betul secara sistemik menghapus terorisme bahkan kepada yang masih berupa embrio. Nah akan sangat ironis, kalau tadi saya perbandingkan dengan yang disampaikan oleh rekan saya disebelah Pak Hasrul Sani ketika kita bicara tentang lapas yang tidak ada hujan pun, tapi terendam terus-terusan di Pekalongan dan memang kami waktu itu berkunjung ke daerah tersebut, makanya saya tertarik bagaimana sebetulnya pemikiran dari Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks perbaikan lapas, dalam konteks ingin menambah lapas baru. Kita setuju pemberantasan terorisme, tapi yang saya tidak setuju adalah ketika kita membuat satu wacana baru tanpa berfikir yang ada tidak diselesaikan secara sempurna. Itu satu pertanyaan saya.

Kemudian yang kedua, Pak Ketua kalau boleh tambah satu lagi. Kita bicara tentang perbaikan atau pelayanan yang tadi didalam buku atau makalah yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keimigrasian. Saya setuju point ini dan sangat mendukung, tapi ironis sekali bahwa ini tidak bisa diharapkan terjadi dibawah. Saya mengalami sendiri hal yang sangat kontradiktif khususnya didaerah Kepulauan Riau dapil saya. Oh ya nama saya Dwi Ria Latifa Pak Menteri dari Dapil Kepulauan Riau Fraksi PDI Perjuangan. Ketika kami kunjungan spesifik di Pelabuhan Batam Center Komisi III pelayanannya kelas 1 bagus bahkan sangat manis, tapi suatu ketika saya memang tanah kelahirannya disana dan berkunjung ke Singapura ditempat keluarga saya juga disana menjadi rakyat biasa, tidak mengatakan bahwa saya adalah Komisi III atau siapa, saya berbaur dengan masyarakat yang terjadi adalah pelayanan masyarakat dibentak-bentak untuk pada saat mengantri. Ketika saya bertanya, kenapa harus dibentak Pak? Toh kita inikan harus menunjukkan pelayanan terhadap

masyarakat dan jawabannya adalah “Ibu harus tahu bahwa kami ini bukan pelayan, kami ini mengawasi, kami capek”. Intinya saya katakan bahwa tidak ada gunannya yang namanya janji surge dibawah ini kalau dibawah SDM-nya tidak bisa diperbaiki dan saya yakin itu tidak terjadi hanya di Kepulauan Riau, tapi terjadi disetiap perbatasan dimana rakyat kecil menggunakan pelabuhan perbatasan yang memang mereka bukan bule, bukan wisatawan asing yang gagah-gagah, tapi mereka adalah rakyat dengan pakaian-pakaian yang sangat sederhana.

Jadi saya ingin katakan bahwa jangan kita melihat keatas terus, tolong perhatikan diperbatasan bahwa rakyat juga perlu dilayani. Mereka pengguna juga selain kita memang bersikap tegas terhadap mereka yang akan menjadi warga negara asing yang masuk untuk melakukan radikalisme dan lain sebagainya, tapi tolong juga ketegasan itu, pelayanan itu tidak berarti dengan bersikap kasar dan tolong disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan. Kalau tidak bisa mengatasi rasa capek, mendingan tidak usah menjadi pelayan masyarakat dibawah. Menurut saya seperti itu.

Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Ketua.

*Wabillahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, lumayan juga makan waktunya. Saya sengaja karena Ibu ini dari partai yang berkuasa, sehingga waktunya saya sengaja tidak batasi Pak Menteri. Pikiran saya tadi kalau sesame ini ya pasti bicaranya tidak panjang-panjang sebab Pak Menterikan mau cepat-cepat, tapi ya ternyata teman juga yang bikin ini, yang bikin lama-lama, jadi susah kita ini. Yang ini berhasil, tapi yang teman sendiri yang susah kan begitu. Baik terima kasih banyak. Ya kan susah ini Pak Taufik sebagai Pimpinan kami. Pak Ruhut tadi itu atasan saya, sehingga saya kasih dia lebih dulu kan begitu. Dipartai, disini dia anak buah, dia tunduk, tapi di partai dia atasan saya itu begitu. Ada lagi sahabat saya dari Fraksi PPP silakan.

#### **F-PPP (Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.):**

Baik, terima kasih Pak Benny.

Ini mungkin yang terakhir kalau lihat waktu ya. saya maklum karena saya bukan dari partai yang berkuasa, partai yang sedang konflik menuju islah. Saya awali dulu dari buku Pak ya ... ini memang luar biasalah bukunya. Sudah banyak tadi teman-teman yang mengulas buku ini. Pak Nasir, Pak Ruhut, Pak Jazuli. Saya ingin mengutip kata Pak Yosana ini dihalaman terakhir. “derap langkah kami selalu bergegas cepat maju, walaupun banyak sekali rintangan yang selalu mencoba menghambat pelayanan dan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Kami tidak pernah mundur sedikit pun, tidak ada istilah tidak bisa dalam kamus hidup saya pasti bisa”. Yasona ... . Saya berharap tadi Pak Nasir bilang kalau boleh buku kedua ada foto dengan Pimpinan, saya kira ini buku pertama seorang menteri setahun cabinet. Belum ada menteri yang menerbitkan buku selain Pak Yasona. Saya tidak

dapat, kalau boleh buku yang kedua Bapak muat juga bagaimana Bapak bisa dan mampu menyelesaikan konflik parpol yang bertikai. Itu jilid 2 Pak. Bagaimana merekasanya dan sekaligus bagaimana solusinya menyelesaikannya. Road show Bapak itu yang luar biasa. Bagaimana seharusnya dalam buku kedua dikutip kalimat Pak Habibie. "saya ketika membuka Rapimnas Golkar, saya adalah mantan pimpinan negara. Saya tahu kalau Pak Luhut dan Pak Yosana datang kemari berarti sudah izin presiden". Itu kata beliau. Itu harus ada dibuku kedua Pak dan bagaimana kami tanggal 5 nanti akan ada istilah di Asrama Haji Pondok Gede itu juga bagian dari buku kedua Pak.

Saya lagi-lagi soal narkoba Pak, saya tidak habis-habisnya dan teman-teman banyak sekali bicara narkoba. Narkoba ini sudah musuh bangsa Pak. Pak Yosana di kampung kita di Medan didapil kita, Pak Luhut saudara saya, Pak Junimart sahabat saya di Medan Pak, dikalangan pelajar ada arisan narkoba. 1 bulan bayar Rp50 ribu Pak dan bertemunya sekali sebulan, mengisap bonnya 2 sampai 3 kali Pak. Cukup Rp50 ribu perorang. Luar biasa Pak, luar biasa narkoba ini. Jadi apa yang kata Pak Junimart ketika pertemuan dengan Kapolri, oknum tentara, oknum polisi termasuk oknum anak-anak Bapak dirutan dan di lapas luar biasa Pak.

Kemarin Buwas menangkap bayangkan sebuah jaringan narkoba operatornya dipenjara, pengedarannya di Tebing Tinggi di dapil kita, disitalah dari Tebing Tinggi Rp17 miliar. Gilingan pagi, tanah, mesin cuci dan lain sebagainya. Pertanyaannya kok bisa. Jadi Pak Yosana tambah menunggu daftar nama dari Buwas kenapa bapak tidak isolasikan saja sekarang? Kenapa harus menunggu daftar nama itu sebagaimana Bapak mengisolasikan Gayus. Kan sudah ada daftarnya Pak. Siapa bandar, siapa pengendarnya dan kalau bisa dibatasi Pak pertemuan dengan orang-orang tertentu. Saya teringat dengan Pak Dosi bom thamrin itu tiga kali pertemuan dengan pelakunya, coba kalau untuk terorisme dan narkoba selain keluarga tidak boleh bertemu. Kan Bapak boleh membuat aturan seperti ini. Saya kira itu tidak melanggar HAM untuk sercurity-nya. Jadi ini hal yang sangat mendesak Pak, jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dari Fraksi Demokrat, Pak Putu dan Pak Ruhut segeralah Bapak buat MoU-nya itu. Sudah Pak ya? ya kalau bisa jilid kedua Pak MoU-nya supaya narkoba ini luar biasa Pak.

Yang terakhir sudah pukul 13.00 2 menit lagi over capacity. Saya pikir tidak ada lagi Pak Rutan dan lapas yang tidak over capacity. Pada saat yang lalu saya ke Medan berkunjung ke Rutan Tanjung Gusta Pak Dirjen ya, Rutan bagus saya masuk sampai kedalam Pak. Rumah ibadahnya bagus, bandnya ada. Kami dan Pak Luhut waktu reses yang lalu nyanyi disana. Saya berkunjung lagi rumah ibadahnya bagus, tempat makannya bagus, olah raganya bagus. Saya juga sempat main badminton disitu Pak sempat, tapi over capacity itu artinya kejahatan makin banyak frekuensinya, kapasitasnya tidak tertampung. Pak Yosana, saya sih mungkin beda pendapat ya. saya kira, saya ditinjau kembalilah Pak tentang pembatasan remisi itu Pak ya apa yang dibuat oleh PP yang digagas oleh Deni Indrayana itu perlu ditinjau kembali Pak supaya over kapasitas itu bisa dikurangi. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa solusinya bukan dengan membangun penjara, bukan membangun lapas. Kalau itu bukan solusi kalau Bapak bilang tadi. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang. Ya kan manusia juga punya hak, tidak selamanya manusia bersalah. Tuhan saja

mengampuni Pak, ada pintu celah tobat, ada pintu celah pengampunan. Tuhan saja maha pengasih, maha penyayang. Tidak selamanya Pak manusia itu bersalah. Orang yang di neraka pun Pak bisa nanti masuk surge Pak. Itu ajaran Pak. Tidak selamanya Pak dia dipenjara. Ada Pak. Oleh karena itu, perlulah Bapak tinjau ulang itu untuk mencegah over capacity itu Pak dan itu tidak manusiawi juga saya pikir perlu Bapak tinjau ulang tentang peraturan itu. Saya kira ini Pak dari saya sebagai penutup dari partai yang belum berkuasa.

Terima kasih Pak.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

Luar biasa. Ada khazanah baru ini Pak, kalau sudah di neraka bisa pindah ke surge. Luar biasa. Baik Pak ini sudah pukul 13.00 kita istirahat saja dulu, kalau bisa 1 jam pukul 14.00 mulai ya untuk kasih kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan jawaban atas hal-hal yang tadi ditanyakan.

...:

Ketua, masih ada satu, dua yang mau tanya termasuk saya.

**PIMPINAN RAPAT:**

Oh masih ada lagi? Tapi ini sudah pukul 13.00. ya kita lanjutkan anti. Saya juga belum menggunakan hak tanya saya biasanya lama ini. Jadi saya skors rapat ini untuk kita mulai lagi pukul 14.00 ya?

**RAPAT DISKORS PUKUL 13.00**

**PIMPINAN RAPAT:**

**Ibu-Bapak Anggota Komisi III DPR, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati.**

Sesuai dengan kesepakatan tadi kita istirahat selama 1 jam karena itu kita skors tadi, maka seizing Bapak-Ibu sekalian skors kami cabut dan kita lanjutkan Rapat kerja kita.

**SKORS DICABUT PUKUL...**

Selanjutnya tadi kalau masih ada yang ingin bertanya apa Mas masih ada? Terakhir Pak ya? pukul 15.00 Pak Menteri ya? pukul 15.00. kita usahakan supaya. Silakan.

**F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T):**

Saya hanya setengah menit, saya hanya mau menyampaikan terima kasih Pak Beni, Pak Laoly soal LMKN Pak. Saya dapat masukan dari teman-teman

pencipta lagu itu karena sesuai dengan Undang-Undang HAKI itu yang diberi amanah langsung oleh pencipta itu LMK, tapi Pak Menteri membentuk LMKN karena LMKN itu tidak ada akses langsung dari pencipta ke LMKN itu terjadi kegamangan di lapangan teman-teman itu, jadi itu saja yang kita minta sosialisasinya dan operasionalnya supaya teman-teman pencipta lagu ini dalam menghadapi MEA dan lain-lain ini bisa lebih kompetitif begitu. Itu saja Pak Benny. Selamat siang Pak Noerdin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, dari meja Pimpinan. Baik, kalau tidak ada lagi, maka selanjutnya kami persilakan Pak Kalos yang punya saya nanti ya kita akan sampaikan dalam rapat yang selalu kita adakan sama Pak Menteri untuk mendalami. Kami persilakan Pak Menteri.

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Terima kasih Pak Ketua.

#### **Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati.**

Terima kasih atas pertanyaan, kritik dan masukan-masukan yang disampaikan. Saya menjawab pertopik barangkali nanti ada beberapa hal yang tersendiri dan ada beberapa yang mungkin saja saya serahkan kejajaran Eselon I. Memang persoalan yang paling masalah buat kita termasuk apa yang dikatakan tadi statement Pak Buwas menyerbu lapas. Kita seperti kami sampaikan tadi sudah ada Mou dengan BNN, MoU dengan Bareskrim bahwa kita, lapas, BNN dan Bareskrim mempunyai program-program sidak bersama ke lapas-lapas tanpa ada halangan karena sudah ada protap dan sudah ada pelaksanaan bersama. Jadi dengan peraturan bersama bahkan di Jawa Timur dan di beberapa tempat itu sama-sama Pak yang dilakukan oleh BNNP, memang tidak BNN, tapi BNNP daerah bekerja sama dengan Polri melakukan sidak-sidak.

Yang berikutnya bahwa kita juga punya satgas yang melakukan baik didalamnya tes urine didalam sidak-sidak termasuk didalamnya sidak secara rendem. Ini adalah merupakan program rutin kita dan kami tidak menutupi bahwa memang ada kita temui penyimpangan-penyimpangan ada masuk ke lapas dan kita sudah melakukan hukuman disiplin berat dalam Tahun 2015 111 orang, hukuman sedang 57 orang, hukuman ringan 73 orang dan sekarang pemberhentian dengan tidak hormat 9 orang dan pemberhentian sementara menunggu putusan 21 orang. Jadi sebenarnya penindakan ini hukuman berat saja sudah ada 111 orang yang kita pecat dengan tidak hormat ada 9 orang ini menunjukkan keseriusan kita bahwa kami sebagai menteri disetiap pengarahannya ke daerah sudah mengatakan kita jil tolerans dalam menangani masalah narkoba dan jika ada petugas-petugas yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kami akan sangat mengapresiasi. Tadi dikatakan ada kalapas atau apa yang narkoba kami akan apresiasi diberitahukan saja ke kita, kita langsung kirim petugas BNN bersama dengan Polri untuk melakukan tes urin kepada siapa saja petugas lapas yang terindikasi.

Yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa tadi ada statement mengatakan kita saya sudah di beberapa media mengatakan kalau ada Kalapas, kalau ada petugas yang menghalangi petugas BNN atau petugas Bareskrim atau siapa saja yang hendak mau masuk ke lapas untuk mengadakan sika narkoba diberitahu ke kita atau berarti petugas itu sudah melanggar hukum karena dia menghalangi penegakan hukum. Saya sudah katakan dan sampai sekarang belum ada yang memberitahu menteri ada petugas, kalau pun dikatakan tidak kooperatif belum ada diberitahu baik secara surat maupun lisan bahwa ada petugas yang menghalangi petugas-petugas baik dari Bareskrim maupun dari BNN yang menghalangi untuk mau sidak atau pun mau mengadakan barangkali bukan namanya penyerbuan, mau sidak atau mau mengadakan penindakan di lapas. Sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada. Nah jadi kami mengatakan saya kira memang ini mungkin suatu statement yang disengaja untuk supaya memberikan perhatian kepada kita memang ada persoalan.

Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan dalam kerja sama kita dengan BNN, kita sudah mengatakan sudah ada kesepakatan membentuk lapas khusus dan itu sengaja dibentuk untuk para bandar-bandar yang ditengarai masih membuat jaringan diluar dan nama-nama itu baru 18 diserahkan kepada kita. Saya katakan kalau masih ada karena di Lapas Gunung Sindur kita sudah *dedicated* tempatnya ya yang memang lapas khusus untuk itu seperti yang disampaikan tadi, kalau masih ada beritahu saja ke kita atau antarkan ke kita. Ambil bersama petugas bawa diserahkan ke kita.

Jadi inilah salah satu kerja sama yang menurut kita bisa mengatasi itu.. ya tahu siapa itu jaringan? Tadi dikatakan jangan ditunggu-tunggu ambil saja. Kan ada 55 ribu napi dan tahanan narkoba. Yang tahu data jaringannya bukan kita karena kita hanya menerima. Bagaimana mengambil? Kita hanya punya yang punya jaringan itu berapa orang kita tidak tahu, yang tahu itu aparat penegak hukum yang punya peralatan intelijen dan lain-lain dari jaringan mana yang ada dan kalau ada jaringan itu aka sangat lebih mudah menangkapnya karena mereka orang didalam, bukan diluar. Kan trus orang tahu langsung saja ambil didalam dimana. Jadi ini yang barangkali perlu kami jelaskan kita sudah cukup mengadakan kerja sama dengan BNNP daerah, BNNP kabupatæn kota dalam rangka melakukan penindakan-penindakan didalam.

### **Bapak-Ibu sekalian.**

Perlu kami jelaskan bahwa 50 rim sekarang posisi 56 ribu narapidana narkoba, ada 57 ribu. Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar dari 170 ribu narapidana. 177 narapidana dan yang 56 ini pada umumnya di kota-kota besar. Jadi over kapastis ini hampir sepertiga kalau secara rata-rata, tetapi kalau dikota-kota besar ini bisa menjadi penghuni lebih dari 50% tempat lapas-lapas kita berarti ada permintaan yang sangat besar, pasar yang sangat besar. Sementara petugas kita, petugas lapas kita sangat kecil sekali jumlahnya. Ada petugas pengamanan kita 14.654 napi dan tahanan 178.327. jadi rata-rata pengawasan perlapas 12 orang rata-rata 12 orang perlapas. Ini rata-rata nasional. 12 orang itu dibagi berapa shift? Jadi ada 3000 ya rata-rata perlapasnya. Jadi kalau ini dibagi lagi memang kondisi Pak benar, kita sangat kekurangan tenaga untuk pengawasan petugas lapas kita, pengamanannya.

Jadi petugas pengamanan kita sangat-sangat terbatas sekali karena jumlah penghuni yang sangat besar. Di Medan misalnya data yang kita punyai dari. Sebagai contoh Pak di lapas kelas 1 Medan isi 2454 pengawas peregu itu 23, standar 1 orang seharusnya 20, tapi ini 23. Ini membuat pengawasan tentunya menjadi tidak maksimal. Jadi kalau 2200 isi diperegu hanya 23 orang sebagai contoh dan kemudian di lapas Palembang dari 1215, di lapas Cipinang dari 2893 hanya 25 ya ini akan menjadi masalah buat kita. Dari Cipinang saja hampir 3000 hanya diawasi peregu dengan luas blok hampir berapa hektar hanya 25 orang.

Jadi ini memang Pak, sekarang kita ada moratorium pegawai ini mempersulit kita untuk tenaga pengawasan yang inilah kenyataan factual dari persoalan bagaimana kita menangani kekurangan termasuk di imigrasi. Persoalan kita adalah sama kekurangan personel yang sangat-sangat membutuhkan perhatian kita. Kondisi kita sekarang kita tidak bisa menambah karena moratorium. Kami sudah menyurati Menpan kita ada minta usul formasi kemarin itu Tahun 2015 13.688 untuk merespon, yan dikabulkan ya 13.568 ya, kemudian ini sama sekali tidak terpenuhi Pak karena ada moratorium. Kami masih menyurati Menpan kembali ya. Jadi kalau ditambah di Tahun 2015 Pak itu Rp13.588 sekarang Tahun 2016 kita tambah 3938 kita butuhkan 17.000 itu ideal kita tidak mengharapkan sebegitu Pak. Jadi memang ini beberapa hal yang barangkali perlu kami sampaikan Pak mengenai hal itu.

Yang kedua tadi dari Pak Junimart. Kami akan senang kalau diberikan nama. Soal bagaimana kita meningkatkan keterampilan napi. Kami mulai tahun lalu sudah meningkatkan penanganan kemandirian napi dan pembinaan napi, dan produksi dari tingkat eselon I menjadi tingkat direktur eselon 2 namanya Direktur Pembinaan Napi dan Produksi. Dibeberapa lapas-lapas kita, kita sudah mempunyai kerja sama baik dengan pihak ketiga luar pertenunan, napi craft, napi berkebun dengan beberapa hotel buat sandal sepatu hotel di beberapa tempat kita sudah melakukan ini. Memang keterbatasan anggaran ini adalah persoalan ini mengadakan CSR dengan beberapa BUMN termasuk Bank Indonesia dalam perkebunan, peternakan sapid an lain-lain. Dengan peningkatan status, bagaimana kita membuat pembinaan napi dan membuat mereka menjadi lebih produktif, kami akan mengalokasikan tambahan anggaran disini dan akan meminta kerja sama dengan beberapa BUMN maupun dengan swasta dalam CSR-nya, sehingga keterampilan-keterampilan napi ada beberapa produk kita pada waktu yang lalu seperti pembuatan bola untuk pesta olimpiade itu dari lapas kita yang membuat bolanya bekerja sama dengan PT3. Pembuatan sepatu, pembuatan softball ada kita, hanya sekarang memang kekurangan tenaga, kekurangan modal adalah menjadi persoalan. Beberapa tempat sudah ada CSR dari beberapa BUMN. Memang kami akan mencoba mencatat apa yang dimasukan Pak Junimart tidak ada mesin jahit di Sidikalang ya. Baru di beberapa tempat yang kita menyediakan lapangan ada mesin cetak, di Cirebon ini untuk pembuatan baju dan lain-lain.

Berikutnya dari paradigma kita tadi dikatakan bagaimana dari Pak Fraksi Golkar apa paradigma tentang narkoba? Pak disini sekarang ada 4 juta dari data survey ada 5 juta pengguna narkoba. Memang Indonesia adalah pasar yang sangat besar karena 5 juta pengguna narkoba berarti marketnya pasti sangat besar Pak. Jadi tidak bisa ditangani. Kalau kita hanya mengandalkan penindakan, sekarang kapasitas lapas kita 114 ribu yang kita isi menjadi 178 ribu sekarang. Kalau 5% saja dari 4 juta kita tangkap, kalau pendekatan ponutif, kalau pendekatannya penindakan. dari 5 juta hanya 5% ditangkap, kalau memang penindakannya saja berarti ada 500 ribu. 550 ribu. Ya 250 ribu hanya 5% kalau ditindak ini dimasukan kedalam,

sedangkan sekarang saja kapasitas 114 ribu kita isi 178 ribu dengan over kapasitas dan pada umumnya di kota Pak itu sudah 60-70% dibeberapa tempat.

Di Lapas Salemba 70% isinya narkoba, Lapas Salemba. Rutan Medan pernah lebih 70% pengguna narkoba. Tadi Pak Hasrul bilang. Jadi bagaimana sebetulnya pendekatan kita mengenai narkoba dan di Lapas Salemba kapasitas 572 orang isinya 2060 orang, jadi tidur bergantung bergantung. Dari 2000 itu 1600 lebih 50% narkoba. Jadi ini data-data yang. Bagaimana menanganinya? Pertama, memang setuju Pak karena dia pasar yang besar, memang kita harus tahan diluar, penindakan harus diluar, tetapi pada saat yang sama Pak pengguna seperti Undang-Undang Narkotika yang dilahirkan oleh Komisi III DPR dulu jamannya Pak siapa jadi KBNN mengatakan pengguna narkoba harus kita rehabilitasi. Tanpa rehabilitasi, tanpa program-program rehabilitasi kita tidak akan mampu. Kalau benar kita ambil latakan saja kalau tidak mampu menindak 5%, katakan saja hanya 2,5% berarti 125 ribu untuk satu lapas berisi 1000 biayanya, pembangunannya Rp150 miliar kira-kira belum personel, belum peralatan hanya bangunan fisik, jadi Rp1150 miliar. Nah kalau begitu Pak, kalau pendekatan funitif saja kita, tadi Pak Hasrul mengatakan kita harus memberikan revisi. Kita tergantung dengan PP 99. PP 99 jangan hanya dilihat korupsinya, tetapi pengguna narkobanya masuk sekian, keluar sekian karena proses revisi menurut PP 99 harus ada rekomendasi Jaksa, maka terhalanglah mereka mendapat revisi. Akibatnya apa? Masuk sekian, keluar sekian. Dia menjadi *rolling* terus setiap tahun, padahal penambahan kita untuk lapas hanya sangat terbatas sekali, maka tahun lalu pemerintah menyediakan anggaran untuk 100 ribu orang untuk rehabilitasi. Tahun ini akan ada lagi dan program itu tidak hanya di lapas, kita juga mempunyai program rehabilitasi di lapas, tetapi anggarannya sedikit juga di dinas Kementerian Sosial di Pemda-pemda dan lain-lain.

Jadi penanganan paradigma kita juga melihatnya Pak, bandar yang harus kita hajar habis pengguna harus kita rehabilitasi. Itu harus begitu. Jadi dia dalam istilah kriminalogi pengguna ini memang victim ... crime. Kenapa dia sampai begitu? Ya kita gagal mencegah itu, sehingga banyak sekarang bandar-bandar yang memainkan itu. Tadi saya katakan ternyata di lapas kita ada anomaly lebih banyak bandar daripada pengguna. Inikan aneh juga. Jadi ini yang menjadi persoalan-persoalan barangkali ada penerapan-penerapan yang ya. Jadi ini yang barangkali di Cipinang sekarang ada di lapas, ada 2286 ya narkobanya.

Jadi ini Pak mengenai narkoba. Kami berharap memang tidak mudah menanganinya. Kita mengapresiasi BNN yang begitu kencangnya, begitu gencarnya, tetapi pada saat yang sama karena lukartif market yang sangat besar 5 juta adalah pasar yang sangat besar, maka semua orang dengan segala cara. Pos lintas batas kita ada 68 belum lagi dari laut yang sulit kita atur, sehingga ini memang kerja yang tidak mudah.

Peningkatan SDM legal drafter Pak, memang kalau internal kita tidak bayar, tapi kalau kita eksternal, memang dari Pemda, dari mana mereka belajar legal drafting terpaksa kita harus pungutin untuk PNBK Pak. Ya kalau nanti anggaran kita lebih baik mungkin bisa saja Pak, tapi sementara ini anggaran kita masih terbatas, jadi kami masih harus mengutip untuk latihan-latihan legal drafting di daerah kita harus ini. Permasalahan orang asing yang menjadi masalah bukan yang di hotelnya, tetapi bagaimana orang-orang dari luar yang memang kita tengarai seperti kita katakan banyak pos lintas batas kita barangkali yang bisa masuk dari perbatasan Kalimantan Utara dan lain-lain yang tidak terdeteksi atau bisa saja yang illegal



masuk resmi, keluar *overstayers* dan ini akan kita kerja sama dengan Polri dan juga dengan masyarakat. Ada tim forla kita untuk mengawasi orang asing, tapi nanti barangkali Pak Dirjen bisa menjelaskannya, tapi kita sudah melakukan relative cukup gencar penindakan-penindakan yang kita butuhkan untuk itu.

Mengenai merek. Tadi dikatakan protokol madrid, memang ini Pak Wihadi ini yang mengenai merek ya kita memang sudah mencoba untuk membahas berkali-kali ternyata data yang ada pada kita akan kita selesaikan Pak. Bukan 100 ribu. Datanya sekarang ini yang tunggakan ada 40 ribu sekarang ini karena kita sudah menambah outshorsing untuk ini ada 40 ribu, sekarang kita menambahkan pemeriksa merek sebanyak 22 orang untuk men-*speed up* ini. 40 ribu akan kita selesaikan dalam 4 bulan kedepan, sehingga pada Bulan Juni 2016 tunggakan tidak ada lagi masuk. Ini dalam rangka merespon apa yang dikatakan Pak Wiyadi tadi dan kalau kita melihat mengapa kita katakan Madrid Protokol ini bisa menguntungkan kita karena memang orang asing itu sendiri juga sekarang sudah mulai masuk mendaftarkan disini Pak. Jadi tidak hanya menunggu madrid protokolnya, mereka gencar juga masuk ke kita. Nah kalau kita mau dengan madrid protokol ini justru menguntungkan kita. Kita daftar disini dan kita mempermudah karena apa? Kita kasih insentif kepada UMKM. Kita berikan kemudahan kepada UMKM dalam rangka mempercepat pendaftaran merek-merek kita.

Jadi permohonan merek dengan sistem madrid menggunakan basic permohonan dari kantor merek nasional ya dengan dasar ini permohonan ini berasal dari Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu di Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM, nah kemudian ke negara-negara lain dengan sistem madrid, jadi prosedur, tetapi apa yang disampaikan Pak Wihadi tetap menjadi masukan kepada kita bagaimana terus menangkal dan melindungi kepentingan-kepentingan merek nasional kita bahkan ada juga orang-orang Indonesia yang cerdas Pak. Diambil merek-merek Luar Negeri yang belum terdaftar dia daftarin sekarang. Banyak sindikatnya dia daftarin. Pada saat merek-merek asing itu mau masuk, dia tidak kasih dan dia sudah terdaftar. Ada juga yang begitu, tapi saya kira masukan dari Pak Wihadi akan tetap menjadi bahan kita untuk mendiskusikannya.

Dari Pak Putu soal bangle itu nanti ada Pak Wayan ya, nanti kita. Anjing pengawas kita sudah anggarkan Pak. Anjing kenain kita anggarkan. Sekarang sedang kita anggarkan Tahun 2016 harga 50 juta persatu, tapi masih perlukan latihan, tapi kita sudah anggarkan untuk itu karena itu yang sangat efektif, hanya memang anjing kenain itu masa hidupnya agak pendek. Memang kita sudah sepakat satu cara disamping peralatan elektronik yang kita gunakan, CCTV yang kita gunakan, tahun ini kita akan meningkatkan pengawasan IT karena kita kekurangan orang, IT kita gunakan, tetapi juga dalam rangka pengawasan kedalam perlu anjing.

Dari Pak Daeng ya itu tadi serbu lapas. Saya katakan tadi kalau ada petugas sampai sekarang belum ada yang dikatakan petugas mana yang menghalangi sampai sekarang. Jadi saya kira memang saya sependapat bahwa memang satu-satunya juga cara adalah memang sidak rutin. Bukan rutin Pak, rendem tanpa diketahui dan itu bersama BNNP kalau di provinsi, BNN K kalau di kabupaten itu bersama dengan Polri. Ini selalu dilakukan dan secara rendem juga kadang memang biaya ada petugas dan yang kita tengarai blok-blok khusus kita kasih rendem cek kepada yurin teks itu dilakukan Pak.

Jadi memang penanganan lapas dalam mengurangi over kapasitas pembangunan harus ada, kemudian kalau kita nanti mengesahkan Revisi Undang-

Undang KUHP dengan adanya restorative just konsep, hukuman restorative justice dan juga revisi Undang-Undang Pemasyarakatan nanti Tahun 2017 ya ini kita akan mengenalkan *erilis program*, jadi hukuman-hukuman ringan, hukuman-hukuman ini kita buat kerja di luar, lapss terbuka kita perbanyak. Ini barangkali satu cara bagi kita untuk menangani persoalan-persoalan ini dan saya kira memang hukum pidana itu adalah ultimum remidid. Ini adalah jalan terakhir sebetulnya. Jadi proses-proses penghukuman, tetapi kecenderungan masyarakat kita yang sangat politif sekarang ini. Sedikit-sedikit masukin, sedikit-sedikit masukin. Ini barangkali memang mungkin juga karena persoalan-persoalan sosiologis dan lain-lain, tetapi saya kira harus ada pendekatan-pendekatan yang baik dalam pengelolaan rehabilitasi dan pembinaan napi kedepannya karena membangun penjara. Pengalaman di Amerika Serikat penambahan-penambahan-penambahan tidak akan bisa diikuti dengan kemampuan keuangan negara untuk membangun lapas kecuali ada program-program rehabilitasi yang bermanfaat dan ditingkatkan dan erilis program dengan system pemantauan yang baik karena masalah terbesar adalah narkoba ya memang rehabilitasi. Cegah masuk penindakan keras, bandar hukum keras, pengguna harus lebih keras. Ini barangkali paradigm yang digunakan untuk itu.

**F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):**

Interupsi Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri.

Kami dari tadi terkait dengan lapas ini Bapak bolak-balik menyatakan kalau ada sipir atau kalapas akan ditindak, kemudian kerja sama dengan polisi, BNN terkait dengan bandar narkoba dan lain-lain dari tadi saya mendengar itu. Saya belum mendengar apa saja tindakannya dari Kumham ini terhadap sipir dan kalapas karena kita tahu ada beberapa yang terjadi di lapas-lapas tersebut. Kemudian siapa yang berhak menindak kalau terjadi hal-hal seperti itu? Apakah langsung Pak Menteri atau Dirjen diberi wewenang itu atau cukup di Kanwil Hukum dan HAM diprovinsi setempat. Ini kami yang belum dapat penjelasan dari tadi Bapak Pimpinan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

Yang pertama, tadi saya jawab Pak ya? hukuman disiplin itu hukuman berat 111 orang, yang kita pecat 9 orang, pemberhentian sementara 21 orang. Itu yang barangkali pertama yang saya sampaikan tadi. Pertama-tama tadi sebelum saya menjawab yang lain. Hukuman ringan 73, sedang 57. Kami di 4 zona. Zona Sumatera, Zona Jawa, Bali dan Sulawesi mengumpulkan seluruh KUPT kalapas termasuk unit imigrasi. Dalam pengalaman kami sudah memberikan peringatan yang sangat keras, tentunya kalau kita menghukum orang banyak yang tidak di cover media, banyak orang-orang yang kita tertangkap didalam operasi kita mungkin media tidak tahu yang sudah kita hukum berapa, yang sudah kita pecat berapa ya. Kadang-kadang baru kemarin Hari Minggu jujur boleh datang ke kantor nanti saya tunjukan hukuman disiplin segini Pak, saya tekan. Boleh datang di kantor. Saya konfirmasi besok, datang masih ada di meja sekjen ya yang dihukum berat, dipecat dengan tidak hormat diluar yang ini, diluar yang ini. Ini data terakhir ini. Hanyakan ini tidak diumumkan di public. Ini adalah tindakan-tindakan keras. Saya sudah mengatakan zero tolerans. Saya membuka shock therapy dengan membuka pakaian sipir. Satu di Batam melalui Dirjen HAM, satu membuka ditempat kita tanpa

membuka tanpa proses hukum pemecatan. Sebagai suatu sinyal positif, sinyal kepada seluruh jajaran, saya tidak ada toleransi dengan cara-cara seperti itu.

Jadi saya kira ini sudah kita lakukan bahwa masih ada orang-orang yang berjuang dengan itu pasti ada Pak, pasti ada. Sama dengan penindakan korupsi yang sangat keras, sangat OTT masih ada saja Pak. Kenapa? Didalam ada orang-orang sangat tergantung belum menikmati rehabilitasi ribuan orang didalam napi narkoba, ketergantungan sangat tinggi berupaya memperoleh barang itu dan ada yang petugas sipir yang lemah imannya dengan iming-iming yang besar, saya tidak mengatakan mereka kebal untuk itu, tapi saya tidak katakan kita akan ada saja cara yang pernah digunakan oleh mereka Pak. Ada pernah sapu tangan bubuk ditaruh disapu tangan ya banyak cara mereka. Jadi tidak mudah, tetapi kita sudah mengatakan kita tidak ada toleransi, maka anggaran untuk anjing kenain ini sudah kita masukan didalam anggaran Tahun 2016. Itu pun mungkin barangkali tidak semua bisa kita cover, hanya beberapa kita ada berapa lapis tadi? Lapis kita ini ada sebanyak 282 Pak. Mungkin yang besar-besar 100 atau menyediakan inikan anggarannya juga cukup besar. Harganya mungkin Cuma 50, tapi latihannya dia harus tetap latihan di Brimob kalau kenain.

Jadi memang ada beberapa metode yang kita gunakan, tetapi selalu kita kerja sama dengan instansi yang lain. Setuju memang bebas visa perlu diwaspadai...

**F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):**

Izin, yang berwenang menindak itu siapa Pak? Apakah Pak Menteri langsung? Izin Pimpinan. Pak Menteri atau Dirjen atau Kanwil ... belum dijawab ini.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Kan ada aturannya Pak. Kalau sudah ada temuannya itu langsung kita turunkan Irjen. Irjen sekarang sudah didelegasikan ke kanwil. Kalau yang berat itu harus langsung ke kita Pak, langsung rapat Baperhubgis langsung dipecat ya. jadi prosedurnya untuk memang kalau sudah tertangkap tangan tidak ada ini, kalau dikasih langsung dibuat tim pakai berita acara karena tetap kita ada prosedur asas praduga tidak bersalah, tetapi dari data ini sudah menunjukkan untuk tahun kemarin 111 lumayan juga Pak hukuman berat. Jadi yang dipecat 9, pemberhentian sementara 21 dan sekarang masih ada antrian banyak yang belum masuk. Masih proses berita acara, rapat Baperhubdis masih ada Pak.

Setuju bebas visa, memang bisa juga karena bebas visa ini ada orang-orang yang membawa tindakan kejahatan. Ada jaringan Ukraina, ada jaringan Cina, syber crime, narkoba dan lain-lain. Kerja sama dengan bea cukai, bekerja sama dengan, tapi karena ini bukan lit sector kami ini adalah domain kalau tangkal didalam itu lebih banyak domain instansi lain Polri dan BNN kalau soal masuknya narkoba, tapi kita dalam pengawasan orang asingnya tetap bekerja sama dengan mereka Pak.

Terima kasih Pak Nasir saran...

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):**

Interupsi Pimpinan. Pak Menteri mengenai masalah orang asing. Mungkin dalam hal ini memang bukan lit sector daripada Pak Menteri untuk sampai dia bekerja dimana, Cuma ada satu hal entry point yang bisa dipakai oleh imigrasi. Adanya in out pada paspor mereka ya. Jadi tidak hanya China, orang Singapura pun banyak yang bekerja di Indonesia illegal. Jadi mereka 1 bulan bekerja di Indonesia, mereka pulang 1-2 hari, mereka kembali lagi. Kalau dilihat in out daripada paspor itu patut dicurigai orang-orang yang demikian, maka dalam hal ini mungkin pintu-pintu gerbang masuknya orang asing perlu petugas imigrasi membuat *attention* bahwa yang in out seperti itu, ini patut dicurigai dan informasi ini bisa diteruskan kepada ketenagakerjaan atau kepada polisi bahkan imigrasi juga bisa melakukan pengecekan dimana sebenarnya dia bekerja. Saya kira ini salah satu hal yang mungkin bisa dipakai sebagai entry point tuk menangani itu.

Terima kasih.

### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Ya Pak. Jadi memang ada beberapa tentunya menggunakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Ya kita tahulah banyak juga yang 30 hari keluar masuk lagi. Hanya memang kalau itu tetap dipantau ya dan datanya diberikan kependidikan, tapi kadang-kadang tidak mudah juga Pak karena tidak boleh kita langsung tindak sebelum ada ini, tapi data itu benar. Sistem kita bisa mendeteksi in out itu dengan frekuensi dan lain-lain bahkan siapa petugas waktu masuk yang menangani bisa kita ketahui Pak, tapi itu masukan yang baik sekali.

Tadi Pak Nasir. Sudah ada Pak tindak lanjut Pak soal hasil BPK, memang *something* ... benar kita sudah berkoordinasi dengan Pak Irjen, Pak Sekjen sudah berkoordinasi. Kita membentuk tim restrukturisasi keimigrasian sekarang penanganannya termasuk didalamnya terus berkonsultasi dan menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai hal itu, ya menindaklanjuti. Saya mengetahui benar apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Saya juga sudah katakan kepada tim restrukturisasi kita tidak mau didikte oleh pihak ketiga, kita yang mendikte pihak ketiga. Sistem kita itu kita yang mendikte, bukan orang mendikte kita. Jadi ini barangkali perlu ya, jadi membentuk tim menghindari ketergantungan kepada pihak ketiga dalam pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi keimigrasian. Dulu Pak sempat temuan BPK itu memang bukan jaman saya, temuan BPK itu ya kita tergantung dependen on baik dalam pemeliharaan dan lain-lain, makanya saya membentuk tim restrukturisasi. Saya katakan "kita meninggalkan legilasi yang baik sekarang tidak ada. Kita yang mendikte. Kita tidak bisa didikte orang, sistem harus terintegrated, sedang dibangun Pak. Mudah-mudahan bertahap pada paruh waktu Bulan Juni, kemudian tahun depan karena kita membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan juga, untuk perbaikan server yang sudah Tahun 2008 lelet membuat kadang-kadang sistem down antrian menjadi panjang itu yang harus kita perbaiki semua Pak sedang dalam perbaikan.

Usul Pak Nasir untuk menambah anggaran, nanti kami akan diskusikan Pak. Saran yang cukup baik, memang dengan mutu anggaran yang kecil mungkin apalagi di daerah-daerah ongkos saja sampai ke daerah mungkin agak berat, tetapi itulah kemampuan anggaran kita, namun barangkali sudah pernah disampaikan mungkin

jumlah yang ini kita perbaiki ya ada perubahan Permenkam 03 ya. Saya kira, secara bertahap nanti kita akan lakukan. Saya setuju bahwa memang perlu.

Nah ini soal binmimini seperti Pak Nasir tahu bahwa Pak Kabin meminta mereka turun dengan satu janji, tetapi seperti kita tahu didalam itu juga ada persoalan-persoalan pelaku-pelaku tindak pidana criminal umum. Jadi dari 100-an lebih itu secara prinsip dalam rangka mengurangi bentrok-bentrok bersenjata di daerah, pemerintah berfikir bagaimana mengajak mereka turun untuk mencegah konflik-konflik yang lebih besar ke depan, maka ditawarkan amnesti. Tentu amnesti pastilah meminta pertimbangan DPR sesuai konstitusi, tetapi dalam hal ini ada beberapa yang sudah diproses hukum Pak. Nanti kita lihat seperti apa mereka, mungkin tidak dalam gelondongan itu. Ini sedang dalam kajian itu Pak, tetapi yang pasti saya sudah menyurati Presiden dan atas permintaan Kabin dan rapat kerja sama internal Polri, BIN dan lain-lain prinsip kita dapat usulkan, tetapi tetap ada rekomendasi-rekomendasi dari penelitian Polri yang bagaimana memperlakukan yang sudah diproses secara hukum. Ada beberapa yang sudah diproses secara hukum karena tidak pidana umum. Itu yang menjadi mengganjal juga kemarin menimbulkan perdebatan yang cukup alot diantara internal kita Pak, tapi prinsip kita berikan. Nanti barangkali kalau perlu beberapa surat yang kita sampaikan, kami sampaikan kepada Pak Nasril.

Kami akan sampaikan nanti peraturan bersama BNN dengan Kumham dan Kumham dengan Bareskrim kami sampaikan Pak. Ya mengenai holcim masih dalam proses. Pak Hasrul setuju ya Undang-Undang Nomor 12 itu sebetulnya sudah kemarin kita siapkan, tapi karena produk legislasi kita Tahun 2015 sedikit mandek, sehingga *carry over* itu terlalu besar. Tahun inikan 40, tahun 2015 40, Pak Hasrul ada di Baleg, 40 dan ada sisa, nanti ada speed bagaimana kita menyelesaikan undang-undang tersisa. Kalau seandainya tahun 2015 kita banyak menyelesaikan mungkin yang revisi ini sangat penting sekali Pak. Saya setuju sekali Pak, memang ini bisa menyelesaikan PP 99. Asal saya pergi ke daerah teman-teman yang napi narkoba dan yang lain-lain juga termasuk napi tipikor dan lain-lain, napi teroris meminta PP 99 ini harus direvisi karena ada persoalan didalamnya. Dengan merevisi Undang-Undang 12 nantinya, saya kira bisa kita lakukan.

Revisi PNPB ini sedang dalam proses pembicaraan tingkat I, pembahasan tingkat I di Komisi XI DPR Pak agak lambat dan mudah-mudahan selesai dan memang itu keinginan kita, jadi tidak berbasis unit, tetapi berbaris KL, sehingga bisa dalam istilah teman-teman di kementerian, hujan bisa jadi merata Pak. Jadi tidak ada kelompok duafa dan borjuis. Imigrasi dan ... benar-benar borjuis Pak. Kadang-kadang pusing dia membelanjakan uangnya. Ya ini persoalan bagi kita. Itu barangkali ide yang sangat baik dan memang itu tujuan kita Pak. Struktur organisasi dan rentang kendali ini sudah ada perubahan ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Hasrul perubahan struktur sudah kita lakukan dengan organisasi tata laksana yang baru. Yang program deradikalisasi di lapas dalam revisi Undang-Undang Teroris Pak ini termasuk nanti, memang harus komprehensif, holistic, tidak bisa satu, memang kami punya keterbatasan, kami tidak punya orang, kami tidak punya ekspertis untuk melakukan itu dan pengalaman kita di lapas sudah ada orang kita yang bermaksud meredekalisasi justru dia yang diradikalisasi. Betul seperti apa namanya yang di Palembang ada 3 orang. Jadi maksud dia deradikalisasi justru dia yang diradikalisasi

3 orang Pak. Jadi memang kalau tanggung-tanggung tidak bisa, jadi pendekatannya harus kompleks ada ahli agama, ada ahli psikologi, ada ekspert-ekspert yang ditangani dan itu kerja sama dengan BNPT dan dengan tim yang kuat Pak. Dalam undang-undang yang akan datang akan lebih diperkuat itu dan ada follow up disapa, kalau sudah program itu keluar harus ada pendampingan dan di beberapa tempat kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan tidak ada pendampingan, ada follow up itu masuk dalam program kita.

Soal Lapas Pekalongan suratnya sudah Pak Hasrul sampaikan, kita lihat kondisi. Saya tidak bisa jamin, kita lihat kondisi siapa yang bisa merelokasi. Sampai sekarang belum ada penawarnya Pak, belum ada yang menawar. Mungkin lokasinya kurang pas atau apa, tapi kalau ada Pemda mau menghibahkan tanahnya kepada kita ya itukan akan memudahkan kita Pak.

Dibeberapa daerah benar tadi Pak Beni atau ini juga mengatakan ada lapas di kota-kota besar Grobogan, Solo banyak sekali Pak. Ya memang persoalannya, kalau Solo bisa menjadi cagar budaya. Kalau sudah begitu kita sulit darimana uang kita, darimana tanah kita. Memang dengan sistem rishlah bisa, menurut sistem rishlah bisa. Saya sudah katakan kalau rishlah supaya jangan ada dusta diantara kita nanti, kita hadirkan BPK, kita konsultasi dengan KPK supaya pelaksanaannya nanti bisa lebih baik.

Dari Pak Taufiqulhadi, Perda dikabupaten Rp13.500 langkah kita untuk mencegah. Kita kemarin baru me-launch buku panduan penyusunan Perda ada Mendagri, jadi kita kerja sama dengan Mendagri Pak melakukan itu ada buku panduannya dan tentunya di Kementerian Hukum dan HAM pada tingkat kanwil ada legal drafter kita. Jadi kita mendorong dan mengajak Pemda untuk menggunakan memakai tenaga-tenaga kita, membimbing mereka para teman-teman di DPR di daerah, sekwan di daerah untuk menggunakan tenaga kerja kita. Tenaga kita, drafter kita untuk melakukan pendampingan didalam menyusun perda-perda itu upaya kita. Kalau sudah evaluasi, nanti sifatnya mau dibatalkan dan dikaji kembali itu di Kemendagri. Jauh sebelum itu terjadi kita sudah meminta daerah-daerah untuk bisa menggunakan fasilitas di Kementerian Hukum dan HAM, walaupun masih kurang, tapi barangkali bisa meminta bantuan legal drafting dan baru saja minggu yang lalu kita mengundang kepala-kepala biro hukum daerah dan lain-lain dihadiri oleh Pak Mendagri untuk penyusunan pedoman peraturan perda setelah kita melihat persoalan-persoalan seperti ini. Sudah kita lakukan Pak hanya tinggal sekarang follow up berikutnya.

Ya bebas visa, memang menurut undang-undang harus kasih program. Itu undang-undangnya demikian, tapi kita mengambil kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata kita, maka sambil kita berikan dengan terus melobi revokasilitasnya nanti kita evaluasi berikutnya Pak. Kita mau coba ini dulu apakah dampaknya bisa mempengaruhi pertumbuhan tingkat pariwisata dan bebas visa adalah bebas visa khusus turisme. Jadi tolong dibedakan bukan bebas visa, bebas visa untuk seluruhnya Pak, bebas visa khusus turisme dan khusus untuk Cina sedang dirumuskan oleh termasuk Kemlu dan beberapa tempat teman dari pariwisata juga supaya dia *on travel agent basis*. Jadi misalnya untuk turisme dari Cina kerja sama untuk turisme bebas visa dari travel agen yang masuk satu

gelombang 500, travel agentnya bertanggungjawab 500 kebelakang. Ini sedang kita betul-betul susun Pak. Jadi jangan supaya masuk 500 seperti Saudara-saudara kita yang pergi ke Syria Umroh, tapi singgahnya di Turki, kemudian tempat lain. Jadi ini sekarang pola seperti ini sedang kita lakukan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran orang asing termasuk yang dikatakan tadi ada yang jualan kaos, ada yang jualan ini, ini harus kita jujur ada itu Pak. Nah itu tindakan dari teman-teman kita yang sudah tadi sampaikan. Ada yang dideportasi dan ada yang di pro justisia cukup banyak.

Peningkatan naskah akademik ya HAM masa lalu. Sekarang Pak kita sedang ada dua pintu. Pro justisia non pro justisia. Dari data-data yang ada dan pembicaraan dengan Pak Jaksa Agung...

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Menteri, bisa saya interupsi. Kita memparpanjang berapa lama lagi? Setengah jam? 30 menit ya? pukul 15.30 ya? oke. Lanjut Pak Menteri.

#### **F-NASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si):**

... baik Pak Ketua terima kasih atas pengertiannya.

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Izin-izin Ketua. Izin saya sebelah kiri Pak Benny. Maksud saya begini yang satu lagi masalah kewarganegaraan mereka yang pergi ke medan perang itu. Jadi menurut Undang-Undang Kewarganegaraan kitakan tidak bisa dicabut kalau tidak negara, tapi dengan revisi Undang-Undang Teroris Pak kita masukan itu. Ya kalau sekarang memang dalam revisi Undang-Undang Teroris tadi bisa dicabut paspor dan tau kewarganegaraan. Itu tergantung ininya. Itu yang kita lakukan. Soal masaham berat masa lalu, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menkopolhukam Kejaksaan Agung khususnya mengenai konsep pro yustisia ternyata banyak persoalan-persoalan bukti yang tidak sempurna Pak dan kita lebih mengarah bagaimana menyelesaikannya secara kekeluargaan. Non pro justisia sedang kita rumuskan langkah-langkah penyelesaian berat hamar selalu sampai dimana mundurnya ini yang sedang kita kaji. Jadi kita berharap tahun ini selesai Pak, tahun ini selesai. Jadi memang opsi yang paling mungkin dilakukan karena proses pro justisianya agak kesulitan bukti-bukti, tapi masih tetap terus dikaji oleh Kejaksaan Agung.

Dari pembicaraan kita Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, Panglima TNI, Kemenko Polhukam, BIN ini yang mau kita pilih dan ini sedang disusun oleh Jaksa Agung sekarang bersama Komnas HAM kalau mau di pro justisia mana bukti-buktinya dan kalau tidak kita masukan ke kelompok non pro justisia termasuk penyelesaian karena kita berharap dosa masa lalu ini jangan menjadi dosa beban sejarah buat kita. Kita harus ambil satu sikap supaya ini bisa kita lakukan secara bersama-sama Pak. Modelnya seperti apa, kemarin mau minta maaf kepada ini modelnya seperti apa? Ini akan kita regret atau penyesalan atau apa, nanti ini masih dikaji, nanti akan dibentuk tim independen bersama pemerintah, tim yang diluar pemerintah supaya tidak bias ambil tokoh-tokoh masyarakat yang ikut memberikan pertimbangan kepada keys yang kita tangani. Itu pendekatannya. Langkah-langkah selanjutnya akan kita teruskan untuk itu. Saya kira itu Pak. Pak

Dossy perbaikan sistem di imigrasi saya sudah katakan tadi Pak, mudah-mudahan dengan tim restrukturisasi yang mau kita lakukan, kita akan mencoba membangun satu sistem yang terintegrasi dan sistem yang kita harapkan bisa lebih cepat, bisa lebih baik, terintegrasi dengan baik dan kita tidak didikte oleh pihak ketiga. Ini yang barangkali penting untuk kita lakukan.

Tadi pertanyaan saya jawab juga dari lapas, ada terorisme, ada narkoba ya. Kita punya lapas SMS Super Maksimum Security yaitu Pasir Putih. Sekarang baru kemarin diperbaiki lagi, tapi itu pun sampai sekarang tidak cukup karena kalau tadi menjawab sekalian apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Latifah menempatkan disatu tempat, menempatkan lapas khusus teroris. Ini juga persoalan menggabungkan orang-orang disatu tempat. Jadi yang dilakukan adalah membuat blok-blok khusus super maksimum di beberapa lapas tertentu seperti Gunung Sindur, Gunung Sindur bukan lapas khusus, tapi lapas biasa kelas 1, tetapi disitu ada blok khusus, jadi tidak semuanya. Blok khusus yang super maksimum. Nah ini akan ada beberapa tempat nanti yang kita bangun di beberapa tempat. Ada di Kalimantan ini sedang dikaji di NTT atau dimana di Nusa Kambangan, Lapas di Nusa Natuna sedang akan dibangun, itu masih akan dibangun Pak. Jadi dia sifatnya blok khusus, sehingga nanti dirotasi. Pemikiran kita adalah misalnya yang ini jangan sampai membangun jaringan disini, pindah, yang ini jangan bangun disini pindah, jadi dia ada perputaran termasuk petugas kita tadi saya jawab usul supaya petugas dirotasi dan itu benar Pak. Jangan sampai sudah sangat nyaman. Ada petugas kita dinaikan pangkat pun dia tidak mau pindah dari situ. Dihukum juga tidak peduli asal disitu. Nah inikan sudah persoalan berarti ada sesuatu Pak. Ya kita bilang *you taked or livedi*, memang itu ditengarai begitu karena dia sudah membangun jaringan disitu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak-bapak tadi bahwa memang ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang seperti itu, jadi harus bisa dirotasi khususnya pada tingkat pengawas Pak. Orang lapas kan harus muter pada tingkat pengamanan. Itu yang paling rentan.

Dari Pak Jazilul Wakil Ketua Badan Anggaran. Ini harus baik-baik kita supaya anggarannya datang ini barang. Ya ayo kerjakan pasti ini Pak Jazilul ada akronim dari pasti professional, akuntabel, sinergis, transparan, inovatif. Jadi budaya revolusi mental tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi kita harus dorong terus. Saya tidak perlu jabarkan satu-satu, tapi itulah budaya yang mau kita kembangkan, budaya birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM kerja pasti. kerja professional, kerja akuntabel, kerja transparan, kerja sinergis dan kerja inovatif. Tanpa inovasi kita tidak ini. Sistem pelayanan ... kita mendapat penghargaan karena inovasi. Inovasi pelayanan. Dulu mendaftar PT berbulan-bulan sekarang tinggal berapa menit 10? Tergantung datangnya. Kalau datanya masuk langsung Pak. Langsung pakai barkot kita. Bapak mau cari siapa pemegang saham PT Astra langsung masuk ke website PT muncul Pak. Ambil barkotnya langsung trub foto dengan HP Bapak, bagaimana nanti, buka lagi tret paten punya asal bayar Rp50 ribu akhirnya masih nuang Pak. 1 hari searching PT berapa Pak? Jadi perhari ini transaksi ... *searching* termasuk virus online termasuk ... online, termasuk PT Online 40 ribu hitung saja kali 50 Pak, Rp50 ribu. Lumayan Pak. Inovasi. Itu tadi budaya inovasi. PNPB Pak, PNPB, tapi masih harus mereka pakai. Itu tadi yang dikatakan Pak yang terhormat Pak Asrul supaya PNPB-nya itu diangkat ke kementerian, sehingga lapas bisa kita bantu dari PNPB ini. Persoalannya bebas visa mengurangi kita Rp1 triliun itu juga persoalan juga termasuk nanti menambah biaya yang dikatakan Pak Nasir untuk biaya bantuan hukum bisa kita tarik disitu, tapi kita tetap butuh Pak Jazilul nanti untuk menambahnya. Itu jangan ditinggalkan saja itu.



Ya kegiatan legislasi, harmonisasi perundang-undangan ya ini Pak tadi kita prolegnas kita 40 undang-undang ditambah 36 nanti untuk tahun ini Pak. Jadi sedang kita sahkan kemarin oleh DPR Prolegnas, jadi tahun ini itu kegiatan legislasi kita dan mudah-mudahan setuju saya bahwa untuk lapas dan migrasi karena ini yang besar Pak. Persoalan paling pelik itu ada di lapas. Baru turun setingkat kebawah diimigrasi. Lapas memang persoalan paling pelik. Over kapasitas, kemudian under staf yang sangat ada yang 17 orang mengawasi 1500 orang, kalau rayet langsung tidak bisa kita selesaikan. Jadi itu persoalan. Kami sedang mencoba mau kembali membujuk Menpan dan ini supaya ada penambahan signifikan.

Dulu saya ingat Komisi III DPR menambah tenaga itu Pak lambat sekali. AKIT kita, AKIT kita cuma 65 Pak pertahun. AKIT cuma 65, AIN cuma 65, memang kita tingkatkan sekarang. **AKIT** menjadi politeknik, AIM akan menjadi politeknik, tapi kita harus tingkatkan, kita harus bangun kampus baru untuk menambah. Kalau kita mau menambah AKIT, AIM kita harus menambah kampus barunya, penambahan dosen, penambahan fasilitas, memang tergantung kepada Bapak-bapak di DPR mau kasih kita berapa uangnya kita siap melayaninya begitu. Kita tantang ya kita mantan dari sini ya kita tahulah bagaimana ya.

Jadi Pak Ruhut ini sudah keluar. Tetap ya MoU, jadi kalau begitu karena tidak ada, saya tidak perlu jawab lagi soal revisi Undang-Undang KPK. Narkoba, bandar segera dieksekusi, sudah banyak yang incraht yang masih banyak yang menggunakan upaya hukum terakhir, jadi belum semuanya incraht. Ada yang masih PK, ada yang mau grasi, jadi masih ada Pak dan urusan eksekusi bukan urusan kita Pak. Kita hanya menyediakan tempat.

Ini sekarang Ibu Dewi Latifah bom Sarinah saya sudah jawab tadi ya membuat lapas teroris, jadi tidak lapas terblok khusus, jadi blok khusus di Pasir Putih, blok khusus ditempat-tempat tertentu. Ini yang sedang kita mau bangun Pak termasuk blok khusus napi narkoba yang punya jaringan yang di Gunung Sindur dan kita lihat nanti kalau tidak cukup kita akan tambah ditempat lain. Saya sudah jawab Lapas Pekalongan. Nah soal pelayanan tadi lain kali Ibu Dwi kalau ada langsung SMS saya atau Pak Dirjen minta SMS Pak Dirjen nomornya. Kalau ke dirjen tidak mempan baru ke saya. Ke dirjen saja dulu. Pasti selesai-pasti selesai, tapi memang saya setuju arogansi-arogansi seperti ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Kita sudah katakan pelayanan-pelayanan nawacita pertama kehadiran negara. Pelayanan public adalah merupakan bagian paling penting.

Persoalan yang paling pelik adalah dilintas batas, pos lintas batas. Kita under staf. Sekarang kita minta nanti ada beberapa yang sedang dibangun, diskau sedang dibangun, di NTT sedang dibangun, di Nunukan sedang dibangun, nanti cara mengatasi apanya retribusi pegawai, Pemda kami sudah membuat MoU dengan Menteri Dalam Negeri dan dalam rangka peningkatan pelayanan paspor, kita tidak mendirikan kanim, tapi membawa ULP Unit Layanan Paspor. Sudah ada yang di mall, dimana itu yang di Surabaya? Di Jakarta ada di mall, jadi nanti kita buat Pak welplay layanan seperti SIM itu, itu pendekatannya. Biaya tidak besar, tapi mengurai antrian panjang di beberapa tempat modelnya welplay ini sedang kita lakukan dan kalau kita kekurangan tenaga, kalau di daerah kita outshorsing Pak atau redistribusi, jadi pegawai Pemda yang mau masuk, tetapi umur 35 kebawah keterampilan IT-nya baik itu kita rekrutmen menjadi ahli status ke imigrasi kita. Itu upaya mengurangi menambah tenaga kita. Outshorsing satu pilihan pertama untuk tingkat ini dan kemudian redistribusi pegawai melalui pegawai pemda yang kita rekrut.

Di Bima kita akan buka satu kantor imigrasi dan di Dompu ULP dengan cara ada pegawai kita yang ini, tetapi kekurangannya kita ambil dari Pemda. Ini kita kerja sama dengan walikota, kita tes dan kita kasih pendidikan, jadi tidak menambah jumlah pegawai, tetapi pegawai Pemda yang ada di daerah. Kalau ke imigrasi masih mau Pak, tapi ke Lapas tidak ada yang mau. Belum ada yang mau. Medis ada, tapi kepala pengamanan belum ada yang mau Pak karena mungkin ya tantangannya terlalu keras didalam dan memang kekurangan staf ini kalau boleh menjadi catatan kita Pak dalam kesimpulan ya akan kami hargai bagaimana kita menambah under staf kita baik di imigrasi maupun di lapas Pak karena jumlah pengamanan itu kalau lapas kita betul-betul terkontrol di penjara dengan baik, tidak ada pilihan lain. Memang sudah kita lakukan, akan kita tambahkan anggaran untuk IT Pak, CCTV dan lain-lain, tetapi paling efektif juga teknologi juga harus ikut manusia. Tidak bisa hanya teknologi saja.

Pelayanan terhadap masyarakat tadi sudah dijawab, tadi ada Pak Asrul, narkoba adalah arisan narkoba benar di kampung kita ya, tapi ini memang seperti yang kita katakan tadi begitu besarnya pasar di negara kita. Sudah berapa dihukum mati bandar terus dapat. Pada saat gencar-gencarnya eksekusi, BNN masih menangkap begitu berapa ton atau apa itu yang kemarin sabu-sabu pada saat gencar-gencarnya eksekusi. Kenapa? Ini tadi lebih mahal dari emas Pak 1 gram. Ini persoalan yang harus kita ini. Jadi caranya mengurangi permintaan dalam negeri. Caranya apa? Revitalisasi. Buka semakin banyak pusat-pusat rehab, penindakan yang keras terhadap bandar ya ini yang paling penting kita lakukan dan negara menyumbang nanti biaya dimasukan di APBN untuk biaya-biaya rehabilitasi ini Pak seperti yang dikatakan Pak Anang pada waktu itu bagi orang yang mau duduk langsung datang ke pusat rehabilitasi tidak akan ditindak, tapi ada persoalan di kita, ada kesungkapan keluarga untuk mengantarkan orang, walaupun sudah diketahui ini harus ada pendidikan Pak. Jadi walaupun sudah tahu anaknya sudah tergantung sungkan membawa ke pusat-pusat rehabilitasi. Ini barangkali pendidikan perlu. Ini yang barangkali juga.

Nah LMKM nanti Pak Tjatur ya memang ini lembaga manajemen kolektif nasional LMK-LMK di daerah dan para pencipta, jadi dia dikumpul di LMKM Pak, nanti didistribusi. Ini modelnya, tapi barangkali sosialisasi yang seperti dikatakan Pak Tjatur akan kami lakukan. Kami terus bekerja di LMK. Ada Rhoma Irama ada beberapa pencipta kita termasuk Sam Bimbo yang betul-betul sangat mengapresiasi Undang-Undang Hak Cipta yang kita buat sangat mengapresiasi dan ini sangat membantu Pak. Jadi rumah-rumah karaoke yang dimana kadang-kadang ada teman-teman juga disana untuk happy-happy, disini tidak ada Pak. Jadi ini akan dikutip, per room-nya itu ada kutipannya. Rp12.000 per room, per tahun. Jadi itu nanti akan dikumpulkan semua dan juga radio. Sebetulnya yang paling besar kalau belajar dari Jepang itu Pak dari ...casting. Kalau semua undang-undang ini dapat kita lakukan dengan baik, mudah-mudahan para pencipta kita tidak akan terjadi lagi seperti Crisye yang harus kita sumbang tidak akan terjadi lagi seperti yang lain-lain.

Di Jepang, di Singapura dan di beberapa negara yang lain ini merupakan pendapatan besar bagi para pencipta. Hari ini saya membaca Sam Simorangkir menuntut sampai sekian miliar itu adalah bagian-bagian dari mana kita tidak menghargai para inventor, para penyanyi yang pada akhirnya bisa membunuh dan termasuk dalam paten Pak. Jadi ini merangsang. Mudah-mudahan dengan ini Pak Tjatur ya saya yakin kalau ini betul-betul kita konsisten dan penegakan hukumnya baik akan tertolonglah para pencipta lagu Bengawan Solo dan lain-lain yang barangkali ada yang pernah sakit kita lihat untuk menghidupi dirinya pun susah

dengan begini akan lebih baik. Saya kira Pak Ketua yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan berkenan. Kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum Pak Ketua, kami akan sisir nanti, kalau diizinkan, kami akan sampaikan secara tertulis kami tidak bermaksud untuk cepat-cepat dari sini. Saya akan lebih senang bergabung dengan teman-teman, tapi barangkali yang bisa kami sampaikan.

*Wallahu muafik ilaaqwa mithorik  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik terima kasih.

Tadi Pak Menteri sudah memberikan jawaban dan penjelasan atas hal-hal yang tadi ditanyakan disampaikan diminta oleh Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR. Sekarang sudah pukul 15.25, maka kami merangkum apa yang menjadi highlight dalam pertemuan kita siang ini dalam bentuk tiga butir kesimpulan. (rekaman terputus) tadi yang pertama, Komisi III DPR meminta hasil ini tadi Menteri Hukum dan HAM melakukan pendeteksian dan pengawasan secara ketat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari dan dalam rumah tahanan dan lapas Indonesia. Jadi bagaimana nanti pengawasannya itu operasionalnya Pak Menteriilah dengan jajarannya. Mungkin nanti ke depan Pak Menteri kalau rapat kerja lagi disampaikan. Dari sekian banyak lapas ini ada sekian yang sudah bebas dan itu baru prestasi.

Jadi kalau kita lihat buku ini, buku apa namanya inikan daftar keinginan. Sudah bagus sih covernya luar biasa, tapi akan lebih bagus nanti kalau sudah oh dari sekian lapas rutan ini sudah bebas transaksi narkoba.. Bentuk dukungan Komisi III DPR dalam rumusan yang pertama ini dari...

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Baru satu lapas bebas, lapas wanita di Semarang Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Jadi kalau Pak Menteri bikin kontes, kontes antar lapas mana yang ...kan luar biasa itu, jadi .... Saya tidak mau kasih tahu karena saya bukan Menteri Hukum dan HAM, tapi itu Pak Menteri banyak kerjaan. Silakan ada masukan? Rumusan ini normative sajalah kalau soal kata-kata ini. Silakan Pak Nasir.

#### **F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S. Ag., M.Si.):**

Kalau saya Ketua mengusulkan penyalahgunaan itu didahulukan. Jadi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap ya karenakan yang beredar itukan yang illegal sebenarnya. Narkoba kadang-kadang juga dibutuhkan dalam kesehatan. Jadi penyalahgunaan dan peredaran illegal atau peredaran gelap narkoba begitu.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Ya-ya oke betul. Itu sama dengan nanti berarti yang resmi boleh.

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Ada yang ini Pak Ketua, ada obat, jadi dalam rehab memang ada methadone, jadi khusus untuk rehab memang itu drugs, tapi yang ini itu legal untuk treatment mengurangi dosis ketergantungan Pak ada.

**PIMPINAN RAPAT:**

Rumusan ini oke ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang kedua, ini soal lapas tadi. Jadi “Komisi III DPR RI mendesak Kemenkum-HAM segera melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur di lapas rutan diseluruh Indonesia dan melakukan kajian keamanan masyarakat terhadap lapas atau hutan yang berada ditengah kota”. Ini kasusnya ini banyak Pak Menteri lapas, rutan ditengah kota yang warisan jaman Belanda dululah. Kadangkala jadi tempat sampah ditengah-tengah kota itu. Mungkin bisa dibikin kebijakan. Silakan kami persilakan Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI soal ini okelah rumusan ya? silakan.

**F-GERINDRA (H.R. M. SYAFI'I, S.H., M.Hum):**

Saya kira, ini memang menjadi perhatian kita dalam beberapa kunjungan, tapi tidak hanya infrastruktur, tapi peningkatan pembinaan mental spiritual para tahanan yang ada di lapas itu. Mungkin bisa ditambahkan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya sudah termasuklah didalam itu ya dan ini tentu manusianya pasti itu sudah undang-undangkan dan tidak usah lagi. Jadi tadikan penjelasan Pak Menteri Hukum dan HAM bagaimana mau melakukan pembinaan kalau ini tidak siap. Jadi bagaimana mau melakukan pembinaan kalau ininya tidak lengkap kan begitu. Oke begitu. Ya sudah pokoknya itulah maksudnya. Oke Pak Menteri ya tidak keberatan ya sudah setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang ketiga, ini Komisi III DPR juga berkali-kali kita minta jadi tadi kami dikirim video mengenai tenaga kerja asing di Kalimantan. Belum MEA ini, tapi dimana-mana. Tadi sudah disidak oleh Menteri Tenaga Kerja di Kalimantan, jadi Nampak sekali masalah pengawasan ini penting. Oleh sebab itu, secara politik kita meminta, Komisi III DPR meminta Menteri Hukum dan HAM untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap orang asing secara ketat terutama dalam menghadapi agenda MEA dengan mengutamakan kepentingan nasional. Jadi saya rasa ini sejalan dengan Pemerintah Jokowi punya kebijakan politik. Ada yang mengusulkan? Ya silakan Pak Sapto.

**F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.):**

Pak, inikan seakan-akan negara kita ini curiga terus. Pak Menteri, saya banyak menerima keluhan juga tenaga kerja asing yang ingin kerja legal itu juga tidak gampang mengurusnya, jadi tidak hanya mengawasi saja, tetapi juga memberikan pelayanan terhadap yang legal itu. Jadi saya tambahkan saja “untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan itu”. Jadi dua-duanya kena Pak karena kalau dalam rangka MEA itukan kita harus melayani juga yang legal, yang memang untuk menguntungkan kita harus dilayani ditingkatkan pelayanannya.

Terima kasih Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Jadi ada penambahan “peningkatan pelayanan dan pengawasan”.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Tidak koreksi Pak, hanya informasi saja. Jadi memang benar itu apa yang dikatakan Pak Tjatur kadang sulit bagi yang legal, tapi itu bukan di kita Pak justru di kementerian lain. Kalau INKA keluar izin memperkerjakan tenaga asing keluar dari Kemenaker di kita itu KITAS-nya itu cuma 2 hari, paling lama 2 hari Pak. Ah persoalan proses untuk memperoleh KITAS hanya selalu imigrasi disalahkan, selalu Kementerian Hukum disalahkan karena ujungnya itu ada di kita. “wah lambat sekali ini izin kerja karena kita yang mengeluarkan KITAS yang disorotnya disini, padahal proses ini tidak bisa dilakukan sebelum ada INTA Izin Memperkerjakan Orang Asing dan ini persoalan. Kami sudah menyatakan, tetapi kita bekerja dengan Kementerian Tenaga Kerja soal ini karena presiden juga, pemerintah juga khususnya sekarang kita investasi dengan staf-staf tenaga-tenaga ahli, investor yang mau datang itu kita juga supaya kecepatan mereka dalam memperpanjang lebih gampang atau mengurus izin untuk tenaga kerja. Jadi hanya untuk informasi saja Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik terima kasih banyak informasinya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Tjatur itu memang Pak Menteri selama ini orang-orang asing ini selalu mengeluh bahwa kita ini kok selalu diawasi jadi objek pengawasan, tetapi pelayanannya hampir minus. Saya rasa masukanlah ini mungkin. Oke kita setuju ya penambahan “pelayanan”. Ya silakan.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):**

Ya mungkin selain masalah pelayanan dan pengawasan kita juga mesti harus tekankan kepada masalah penindakan. Jadi kepada pekerja asing illegal itu kita harus langsung lakukan deportasi dan inikan penindakan, jadi lebih kepada kita juga melakukan selain pelayanan dan pengawasan ada penindakannya juga.

**PIMPINAN RAPAT:**

“Pengawasan serta penindakan”.

**F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):**

Ya bukankah pengawasan itu sudah termasuk bagian daripada penindakan. Kalau pengawasan ada sesuatu hal yang tidak beres pasti ditindak. Jadi kalau kita masukan lagi penindakan, nanti double-double. Jadi cukup pengawasan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Ya maksudnya mengenai rasio orang asing ini penting Pak. Mungkin Pak Menteri nanti menyusun metodenya. Inikan saya tidak tahu berapa juta ini orang asing masuk ini. Metoda yang dipakai oleh pemerintah untuk mengawasi kelakuan orang asing di Indonesia ini seperti apa kan kita tidak tahu. Mestinya ini yang pemerintah menyampaikan kepada kita “ini loh metoda yang kami lakukan”, tapi kedepan mudah-mudahan bisa disampaikan. Jadi orang asing yang masuk ini bagaimana monitoring sistemnya, bagaimana metode untuk mengetahui orang asing ini bikin ini-ini disini, kemudian bagaimana sistem pelaporannya. Ya kita sama-sama tahulah ini kedepan kita sempurnakan sistem ini. Jadi kita setuju ini pelayanan, pengawasan dan penindakan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Izin Ketua, jadi kalau penindakan itu sesudah ketat saya kira karena penindakan hanya kepada orang yang menyalahgunakan, jadi supaya jangan satu pengawasan meningkatkan pelayanan. Jadi penindakan inikan harus kepada orang yang. Jadi artinya ada bunyinya disitu dan penindakan kepada orang-orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan serta penindakan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Jadi pengawasan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran maksudnya. Kan begitu ya? “meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian” kan begitu. Itu saja titik saja disitu. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Ada satu lagi? Tadi Pak Menteri minta “Komisi III DPR RI mendukung sepenuhnya usul Menkumham untuk penambahan personil terutama dibidang imigrasi dan pemasyarakatan guna memaksimalkan pelayanan tugas dan fungsi”. Termasuk anggaran tentu masuknya disini. Termasuk anggaran tidak boleh mendukung usulan ya termasuk anggaran ya. oke, saya rasa Pak Menteri...

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

Kalau ditambah terakhir Pak, “memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan”.

**PIMPINAN RAPAT:**

“fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Oke, saya rasa itu ya?”

**(RAPAT: SETUJU)**

Oke. Dengan demikian, mungkin arahan yang ingin disampaikan Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM RI:**

**Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan Pak Beni dan seluruh teman-teman.**

Saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan, dukungan, kritik-kritik saya kira ini merupakan hal yang sangat berharga buat kami dan jajaran dalam kerangka meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik kepentingan bangsa dan negara kita.

Terima kasih sekali lagi.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik dengan *closing statement* tadi, maka rangkaian kegiatan rapat kerja kita siang ini kami tutup disertai ucapan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya dan juga kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI. Demikian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.35 WIB**

**Jakarta, 3 Februari 2016  
a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat,**

**Dra. Tri Budi Utami, M.Si  
NIP.196105201988032001**